

**ANALISIS PENGARUH KREDIT INVESTASI,
EKSPOR NON MIGAS, PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN, PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI TERHADAP
KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR PROVINSI
DI PULAU JAWA-BALI**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Richa Zulfia Indah
125020100111039**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**ANALYSIS THE INFLUENCE OF CREDIT
INVESTMENT, NON OIL AND GAS EXPORTS,
LABOR PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL
SECTOR AND LABOR PRODUCTIVITY OF
INDUSTRIAL SECTOR AGAINST ECONOMIC
INEQUALITY IN JAVA-BALI ISLAND**

MINOR THESIS

Arranged By :

**Richa Zulfia Indah
125020100111039**

**Presented as One of the Condition to
Achieve the Degree of Bachelor of Economics**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Kredit Investasi, Ekspor Non Migas, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali"

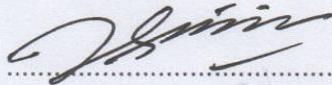
Yang disusun oleh :

Nama : Richa Zulfia Indah
NIM : 125020100111039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **07 April 2016** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

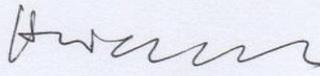
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
NIP. 19710111 199802 1 001
(Dosen Pembimbing)



.....

2. Dr. Iswan Noor, SE., ME.
NIP. 19590710 198303 1 004
(Dosen Penguji I)



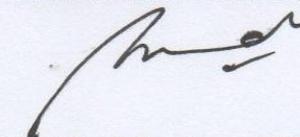
.....

3. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., MA., Ph.D.
NIP. 19761003 200112 1 003
(Dosen Penguji II)



.....

Malang, 07 April 2016
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Richa Zulfia Indah**
Tempat, tanggal lahir : **Kediri, 27 Mei 1994**
NIM : **125020100111039**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**
Alamat : **Jl. Watugong No.26 Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :
**Analisis Pengaruh Kredit Investasi, Ekspor Non Migas, Produktivitas Tenaga Kerja
Sektor Pertanian, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap
Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

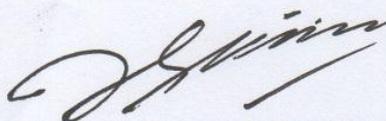
Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Maret 2016

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Yang membuat pernyataan,



Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
NIP. 19710111 199802 1 001



Richa Zulfia Indah
NIM. 125020100111039

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

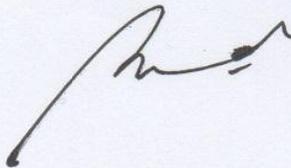
**ANALISIS PENGARUH KREDIT INVESTASI, EKSPOR NON MIGAS,
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN EKONOMI
ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA-BALI**

Yang disusun oleh :

Nama : Richa Zulfia Indah
NIM : 125020100111039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

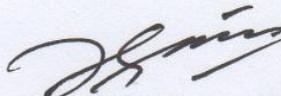
Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

**Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi**



**Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001**

**Malang, 17 Maret 2016
Dosen Pembimbing**



**Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
NIP. 19710111 199802 1 001**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Richa Zulfia Indah
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 27 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Langkat No. 86 Pare-Kediri
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI

Riwayat Pendidikan

1. Lulus SD tahun 2006 di SDN Pelem 1 Pare
2. Lulus SMP tahun 2009 di MTs Negeri 1 Pare
3. Lulus SMA tahun 2012 di SMA Negeri 1 Pare
4. Lulus S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pengalaman Kegiatan Kemahasiswaan

1. Staff Magang Divisi Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2012
2. Staff Tetap Divisi Administrasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2013
3. Staff Divisi Administrasi *International Dialogue of Economics* (IDE) tahun 2013
4. Staff Divisi Administrasi *Entrepreneur Seminar & Business Plan Competition* (ESBC) tahun 2014

Pengalaman Lain-Lain

1. Anggota Tim Surveyor Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Poso tahun 2015
2. Anggota Tim Surveyor mengenai *Household and Income* di Kampung Selang, Baturetno, Dampit bersama International Development Studies Gsas, Tohoku University tahun 2015

HALAMAN MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*“Jadikan
SABAR & SHALAT
sebagai penolongmu ...”*

Al-Baqarah : 45



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada
Ibu, Alm. Bapak, Mas Diar dan Almh. Mbak Devi*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT sebagai pencipta seluruh alam semesta. Manusia diciptakan tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Skripsi ini penulis selesaikan sebagai bentuk ibadah dan ungkapan rasa syukur dalam dunia pendidikan yang sedang penulis jalani. Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan guna membantu proses penyelesaian penulisan skripsi. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Suryadi dan Imroatin yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam melakukan segala kegiatan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
2. Kakak tercinta yaitu Deliar Nur yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam melakukan segala kegiatan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
3. Rekan-rekan seperjuangan Cici, Ifa, Gata, Afini, Fitri, Ilyan, Desi, Aci, Widya, Mbak Armis dan Mbak Fitra yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi selama menjalani kegiatan perkuliahan.
4. Dr. Moh Khusaini, SE., M.Si., MA selaku dosen pembimbing penulis atas kesediannya dalam memberikan waktunya untuk membimbing dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Sasongko, SE., ME selaku dosen pembimbing informal penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Iswan Noor, SE., ME dan Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., MA., Ph.D sebagai dosen penguji sidang komprehensif.

7. Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
8. Putu Mahardika, SE., M.Si., MA., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
9. Seluruh dosen pengajar jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya beserta staff jurusan yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah membantu selama proses maupun setelah ujian komprehensif yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin dalam penyusunannya, baik mengenai materi maupun teknis penulisannya. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diperlukan saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis berharap nantinya dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya para pembaca.

Malang, 7 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Riwayat Hidup	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstraksi	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Pembangunan Ekonomi	9
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
2.2.1 Teori Klasik	11
2.2.2 Teori Keynesian	15
2.2.3 Teori Neoklasik	18
2.3 Teori Investasi	21
2.3.1 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	23
2.4 Teori Ekspor	23
2.4.1 Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi	25
2.5 Teori Produktivitas	25
2.5.1 Analisis Mikro	26
2.5.2 Analisis Makro	26
2.5.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian	28
2.5.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	28
2.5.3 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi	29

2.5.3.1 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.5.3.2 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri dengan Pertumbuhan Ekonomi	30
2.6 Teori Ketimpangan Ekonomi	30
2.6.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Ekonomi	37
2.6.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Ekonomi.....	38
2.6.3 Hubungan Ekspor dengan Ketimpangan Ekonomi	38
2.6.4 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dengan Ketimpangan Ekonomi	39
2.6.4 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri dengan Ketimpangan Ekonomi	39
2.7 Penelitian Terdahulu	39
2.8 Kerangka Pemikiran	42
2.9 Hipotesis	43

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	45
3.3.1 Definisi Operasional	45
3.3.2 Variabel dalam Penelitian	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	47
3.5 Jenis dan Sumber Data	47
3.6 Metode Analisis	48
3.6.1 Estimasi Data Panel	50
3.6.1.1 Common Effect Model (CEM).....	50
3.6.1.2 Fixed Effect Model (FEM)	50
3.6.1.3 Random Effect Model (REM)	52
3.6.1.4 Uji Chow	52
3.6.1.5 Uji Hausman	53
3.7 Uji Asumsi Klasik	53
3.7.1 Uji Linieritas	54
3.7.2 Uji Normalitas	54
3.7.3 Uji Multikolinieritas	55
3.7.4 Uji Autokorelasi	55
3.7.5 Uji Heteroskedastisitas	56
3.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
3.9 Uji Hipotesis	58

BAB IV: PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.1.2 Kondisi Perekonomian Pulau Jawa-Bali	64
4.1.3 Gambaran Umum Variabel	68
4.1.3.1 Ketimpangan Ekonomi Wilayah	68
4.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	69
4.1.3.3 Kredit Investasi	70
4.1.3.4 Ekspor Non Migas.....	71

4.1.3.5 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian	72
4.1.3.6 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	73
4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Uji Statistik	74
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	75
4.2.1.1 Uji Linieritas	75
4.2.1.2 Uji Normalitas	76
4.2.1.3 Uji Multikolinieritas	77
4.2.1.4 Uji Autokorelasi	77
4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas	78
4.2.2 Estimasi Data Panel	80
4.2.2.1 Uji Chow	80
4.2.2.2 Uji Hausman	81
4.2.2.3 Hasil Regresi Data Panel	82
4.2.2.4 Uji F	83
4.2.2.5 Uji t	84
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	85
4.3.1 Pengaruh Kredit Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa-Bali	85
4.3.2 Pengaruh Ekspor Non Migas terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa-Bali	88
4.3.3 Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa-Bali	94
4.3.4 Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa-Bali	98
 BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	102
5.3 Keterbatasan Penelitian	104
Daftar Pustaka	105
Lampiran	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Distribusi PDRB Pulau-Pulau di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2013 (Persen)	3
1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2013 (Persen)	3
1.3 PDRB Per Kapita Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 (Ribu Rupiah)	4
1.4 Indeks Williamson Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013	5
2.1 Tipologi Klassen untuk Pengidentifikasian Daerah Tertinggal	36
4.1 Struktur Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa-Bali Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013	64
4.2 PDRB Per Kapita Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Ribu Rupiah)	65
4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Provinsi Di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013	66
4.4 Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013	67
4.5 Hasil Uji Linieritas	75
4.6 Hasil Uji Normalitas	76
4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	77
4.8 Uji Autokorelasi	78
4.9 Uji ARCH Heteroscedasticity Test	79
4.10 Hasil Uji Chow	80
4.11 Hasil Uji Hausman	81
4.12 Hasil Regresi Data Panel menggunakan <i>Fixed Effect Method (FEM)</i>	82
4.13 Posisi Kredit Perbankan Menurut Provinsi dan Sektor Ekonomi Utama di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012	86
4.14 Sektor yang Mendominasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012.....	87

4.15 Nilai Ekspor Masing-Masing Provinsi Di Pulau Jawa-Bali Tahun 2009-2013 (Juta US\$)	89
4.16 Ekspor Sektor Industri Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (persen)	91
4.17 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013	91
4.18 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB Provinsi di Pulau Jawa-Bali (persen)	92
4.19 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (juta orang)	95
4.20 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (orang)	96
4.21 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012 – 2013 (juta/pekerja).....	99
4.22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Menurut Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (orang).....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Fungsi Produksi Neo Klasik	20
4.1 Peta Pulau Jawa – Bali	61
4.2 Kuadran Tipologi Klassen Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013	67
4.3 Indeks Williamson Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013	69
4.4 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Persen)	70
4.5 Kredit Investasi yang disalurkan oleh Bank Umum di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Triliun Rupiah)	71
4.6 Ekspor Non Migas Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta US\$)	72
4.7 Rata-Rata Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Pulau Jawa Bali Tahun 2005-2013 (Juta/Pekerja)	73
4.8 Rata-Rata Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pulau Jawa-Bali Tahun 2005 – 2013 (Juta/Pekerja)	74
4.9 Indeks Williamson Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012-2013	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Indeks Williamson menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013.....	108
2. Kredit Investasi menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Triliun Rupiah).....	108
3. Ekspor non Migas menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta US\$).....	109
4. Produktivitas tenaga Kerja Sektor Pertanian menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Jutaa/Pekerja).....	109
5. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta/Pekerja).....	110



Analisis Pengaruh Kredit Investasi, Ekspor Non Migas, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa-Bali

Richa Zulfia Indah, Khusaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: richazulfiindah@gmail.com

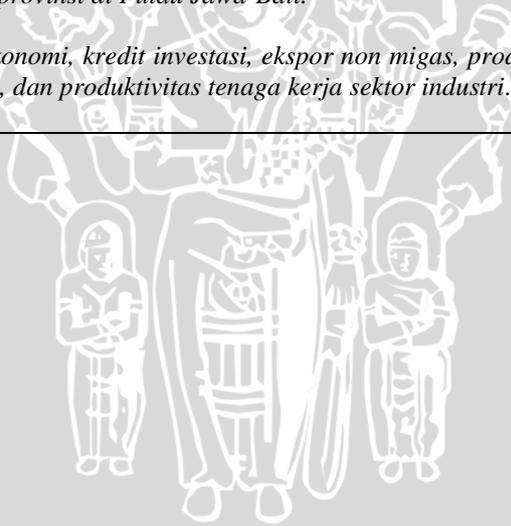
ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi merupakan sebuah permasalahan yang mengiringi suatu proses pembangunan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa-Bali. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dicapai oleh beberapa daerah. Sehingga timbul suatu daerah yang dikategorikan sebagai daerah maju (developed region) dan daerah terbelakang (underdeveloped region). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel dengan pendekatan efek tetap (fixed effect) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi tingkat ketimpangan ekonomi di 7 provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan alpha sebesar 5 persen variabel kredit investasi, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Sedangkan variabel ekspor non migas berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Kata kunci: Ketimpangan ekonomi, kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang umum dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan negara maju menurut Rostow telah melalui lima tahapan pembangunan yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan konsumsi massa yang tinggi. Sementara itu menurut Todaro dan Smith (2006:22), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dipilih sebagai langkah dalam melakukan sebuah proses pembangunan karena pertumbuhan ekonomi mampu menunjukkan sebuah dampak nyata dari hasil pembangunan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sebuah penambahan produksi akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDRB). Menurut Schumpeter dalam Putong (2013:411), pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh penambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan.

Menurut teori neoklasik pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui tiga instrumen, yaitu melalui persediaan modal, tenaga kerja dan teknologi. Sementara itu menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, beberapa hal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya

adalah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan akumulasi modal. Sedangkan menurut teori Keynesian, untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibutuhkan peran serta dari investasi, pengeluaran pemerintah dan perdagangan luar negeri (ekspor).

Dalam melakukan proses pembangunan, negara berkembang lebih terfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar negara berkembang menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, negara berkembang menempuh jalan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain setelah terjadi pertumbuhan ekonomi, timbul permasalahan baru dibalik proses pembangunan tersebut yaitu, ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hanya mampu dicapai oleh beberapa daerah. Dengan kata lain beberapa daerah dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga timbul suatu daerah yang dikategorikan sebagai daerah maju (*developed region*) dan daerah terbelakang (*underdeveloped region*).

Berdasarkan teori Kuznets, proses pembangunan suatu wilayah selalu diikuti dengan adanya permasalahan sosial yaitu masalah ketimpangan. Dalam analisisnya yang dikenal dengan hipotesis U terbalik, Kuznets menjelaskan tentang tahapan - tahapan pembangunan wilayah. Pada tahap awal pembangunan akan terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Namun hal ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Ketika kondisi perekonomian sudah mulai stabil akan mulai terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan (Todaro dan Smith, 2006:254).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan sebuah permasalahan baru yaitu ketimpangan ekonomi. Di Indonesia *share* PDRB terbesar dimiliki oleh Pulau Jawa-Bali yang dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Pulau-Pulau di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2013 (Persen)

No.	Wilayah	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Sumatera	23,8	22,3	22,2
2.	Jawa+Bali	58,7	58,9	59,2
3.	Nusa Tenggara	1,7	1,5	1,5
4.	Kalimantan	9,4	9,4	9,3
5.	Sulawesi	5,2	5,5	5,6
6.	Maluku dan Papua	2,7	1,5	2,5

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2011 distribusi PDRB Pulau Jawa-Bali adalah sebesar 58,7 persen. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 58,9 persen dan 59,2 persen. Selanjutnya, disusul oleh Pulau Sumatera yang meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 23,8 persen, 22,3 persen dan 22,2 persen. Distribusi PDRB tersebut sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau dengan distribusi PDRB terendah yaitu Pulau Nusa Tenggara yang hanya berkisar 1,5 persen.

Sementara itu, apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa-Bali tergolong tinggi yaitu berada di atas 5,5 persen.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2013 (Persen)

No.	Wilayah	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	DKI Jakarta	6,73	6,53	6,11
2.	Jawa Barat	6,51	6,28	6,06
3.	Jawa Tengah	6,03	6,34	5,81
4.	DI Yogyakarta	5,17	5,32	5,40
5.	Jawa Timur	7,22	7,27	6,55
6.	Banten	6,38	6,15	5,86
7.	Bali	6,49	6,65	6,05

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2014

Dibalik tingginya kontribusi PDRB Pulau Jawa-Bali terhadap PDB nasional dan tingginya pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali terdapat permasalahan yang mengiringinya. Permasalahan tersebut adalah ketimpangan ekonomi antar provinsi masih cukup tinggi. Jika dilihat dari salah satu indikator dasar untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah yaitu pendapatan perkapita terlihat bahwa dari 7 provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali terdapat satu provinsi yang memiliki pendapatan perkapita yang sangat menonjol di antara provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta. Sedangkan provinsi lainnya masih di bawah PDRB Perkapita rata-rata Pulau Jawa-Bali.

Tabel 1.3 PDRB Per Kapita Provinsi di Pulau Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 (Ribuan Rupiah)

No.	Provinsi	Nilai
1.	DKI Jakarta	130.111
2.	Jawa Barat	24.119
3.	Jawa Tengah	21.852
4.	DI Yogyakarta	21.040
5.	Jawa Timur	31.093
6.	Banten	29.035
7.	Bali	28.131
Rata-Rata		40.769

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2014

Berdasarkan data di atas, daerah yang memiliki nilai PDRB Perkapita di atas PDRB Perkapita rata-rata Pulau Jawa-Bali yang sebesar Rp 40.769,00 adalah DKI Jakarta, yaitu nilainya sebesar Rp 130.111,00. Sedangkan enam provinsi lainnya memiliki nilai PDRB Perkapita di bawah PDRB Perkapita rata-rata Pulau Jawa-Bali. Dari keenam provinsi tersebut, provinsi dengan PDRB Perkapita terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp 21.040,00.

Sementara itu jika dilihat dari sisi indeks williamson yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah terlihat hal yang sejalan. Ketimpangan ekonomi antar provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali dari tahun ke tahun terlihat relatif tetap namun tergolong tinggi. Hal tersebut secara

detail dapat dijelaskan melalui nilai indeks williamson per provinsi dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Indeks Williamson menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2009-2013

No	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
1.	DKI Jakarta	0,53	0,53	0,53	0,63	0,65
2.	Jawa Barat	0,56	0,56	0,60	0,54	0,55
3.	Jawa Tengah	1,07	1,05	1,05	0,85	0,83
4.	DI Yogyakarta	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48
5.	Jawa Timur	1,10	1,10	1,11	1,05	1,07
6.	Banten	0,72	0,65	0,64	0,99	0,98
7.	Bali	0,35	0,34	0,35	0,33	0,33

Sumber : Badan Pembangunan Nasional, 2014

Dari tabel di atas nilai indeks williamson provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali dari tahun 2009 hingga 2013 mayoritas tergolong sedang hingga tinggi. Provinsi tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Sementara itu hanya terdapat satu daerah yang tergolong daerah yaitu Provinsi Bali. Alasan dipilihnya Pulau Jawa-Bali sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan pemaparan kondisi perekonomian di wilayah Jawa-Bali di atas, ditemukan sebuah permasalahan yaitu meskipun *share* PDRB pulau tersebut terhadap PDB Indonesia dan pertumbuhan ekonominya tergolong tinggi namun kondisi ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa-Bali juga masih tinggi.

Ketimpangan ekonomi antar daerah dapat dijelaskan melalui perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Sementara itu pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan variabel investasi, ekspor (teori keynes) dan produktivitas tenaga kerja (teori neoklasik). Hal ini dapat terjadi karena

keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi beberapa faktor tersebut. Apabila perkembangan beberapa faktor tersebut berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya maka akan berakibat pada perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan hal ini akan menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Rui Hao dan Zheng Wi (2007) yang berjudul "*Fundamental Causes of Inland Coastal Inequality in Post Reform China*" menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara liberalisasi perdagangan yang diukur melalui ekspor dan impor terhadap ketimpangan ekonomi setelah reformasi di China. Don J. Webber dan Michael Horswell (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "*Microeconomic Foundations of Geographical Variations in Labor Productivity*" menyatakan bahwa tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh struktur pasar sehingga dengan pendekatan empiris dapat dilihat pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi. Dierk Herzer and Peter Nunnenkamp (2013), dalam penelitiannya yang berjudul "*Inward and Outward FDI and Income Inequality: Evidence From Europe*" dalam jangka pendek terdapat pengaruh negatif dari investasi swasta yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan sedangkan dalam jangka pendek pengaruhnya adalah positif. Amir Rubin dan Simon Fraser (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US*" menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pemaparan teori, penelitian terdahulu dan permasalahan terkait dengan ketimpangan ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul "**Analisis Pengaruh Kredit Investasi, Ekspor Non Migas, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Ekonomi antar**

Provinsi di Pulau Jawa-Bali". Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan untuk penyelesaian permasalahan ketimpangan ekonomi khususnya di Pulau Jawa-Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kredit investasi terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali?
2. Bagaimana pengaruh ekspor non migas terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali?
3. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja sektor pertanian terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali?
4. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali?

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kredit investasi terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh ekspor non migas terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh produktivitas tenaga kerja sektor pertanian terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.
4. Untuk mengetahui pengaruh produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

1.4 Manfaat Penelitian :

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menganalisa faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali, serta memberikan bahan masukan mengenai kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa-Bali.
2. Memberikan tambahan referensi kepada civitas akademika dalam mengembangkan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah di masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Jhingan 2003:4-5). Istilah pembangunan ekonomi lebih digunakan untuk negara berkembang sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih digunakan untuk negara maju. Di negara maju kenaikan pada pendapatan disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara di negara berkembang kenaikan pada pendapatan disebut dengan pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena menurut Hicks dalam Jhingan (2003:4), negara terbelakang (*underdeveloped country*) masih perlu untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya yang ada di wilayahnya. Sedangkan untuk negara maju (*developed country*) sudah pada tahap mengembangkan sumber daya yang mereka miliki yang telah ditemukan sebelumnya.

Pembangunan ekonomi memiliki makna lebih luas jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu keadaan dimana peningkatan pendapatan perkapita yang diiringi dengan penurunan pada kesenjangan pendapatan baik antar masyarakat maupun antar wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Okun dan Richardson dalam Jhingan (2003:7), perkembangan atau pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan material dalam jangka panjang yang terus mengalami perbaikan yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.

Menurut Todaro dan Smith (2006:19), konsep pembangunan jika dilihat dari perspektif tradisional merupakan sebuah proses untuk meningkatkan dan mempertahankan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dari sebuah kondisi ekonomi yang bersifat statis menjadi tumbuh sekitar 5 hingga 7 persen.

Sementara itu salah satu tujuan utama dari pembangunan adalah untuk peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup. Barang kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), fasilitas kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Tingkat pemerataan ketersediaan berbagai macam kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh hasil dari proses pembangunan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam proses membangun itu sendiri melalui proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan perkapita (*income per capita*). Pada dasarnya pendapatan perkapita tersebut mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam memproduksi output dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan atas produksi barang atau jasa. Indikator yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan output per periode adalah dengan membandingkan nilai moneter yang tercermin dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat perbaikan kondisi perekonomian, yaitu melalui struktur produksi (pendekatan sektoral) dan daerah asal produksi (pendekatan regional) (Rahardja dan Manurung, 2008:141).

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana :

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB satu periode sebelumnya

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila pendapatan perkapita mengalami peningkatan. Apabila pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu daerah mengalami peningkatan maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam daerah tersebut semakin sejahtera. Namun, untuk semakin meningkatkan pendapatan perkapita tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertambahan penduduk. Sementara itu tingginya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Jika hal tersebut tidak terjadi akan menimbulkan permasalahan baru yaitu ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Terdapat banyak teori yang mampu menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori yang menjelaskan akan hal tersebut akan dibagi dalam beberapa aliran beserta para ahli ekonomi yang menyumbangkan pemikirannya dalam aliran tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori Klasik

Ahli ekonomi yang berperan dalam menyumbangkan pemikirannya dalam mazhab ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Menurut pandangan klasik dalam Arsyad (2010:70-71), syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai keserasian dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum (*economic harmony and general welfare*) adalah spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas. Adam Smith terkenal dengan bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776).

Inti dari pemikiran Adam Smith adalah mekanisme pasar bebas (*laissez fair*) yang diterapkan dalam perekonomian akan dapat menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya. Smith sangat menentang adanya campur tangan

pemerintah dalam kegiatan perekonomian karena pemerintah dianggap sebagai pihak yang mengganggu bekerjanya mekanisme pasar. Menurutnya di dalam pasar terdapat tangan gaib (*invisible hand*) yang bekerja mengalokasikan setiap sumberdaya agar perekonomian tetap berada dalam kondisi keseimbangan.

Selain itu, Adam Smith juga menjelaskan tentang teori akumulasi modal, pembagian kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Fokus pertumbuhan ekonomi Adam Smith menurut Arsyad (2010:74), dibagi kedalam dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Aspek yang pertama yaitu pertumbuhan output total didorong oleh tiga hal, yaitu (1) Sumber daya alam yang tersedia, (2) Sumberdaya manusia, (3) Akumulasi modal yang dimiliki.

Sumber daya alam yang tersedia akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila belum tergunakan secara maksimum. Namun, apabila sumber daya alam tersebut telah digunakan secara maksimum maka pertumbuhan ekonomi akan terhenti. Sumberdaya yang tersedia tersebut mendorong jumlah penduduk dan stok modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumberdaya manusia diidentikan dengan jumlah penduduk atau jumlah tenaga kerja yang berkontribusi dalam sebuah proses produksi. Sementara itu, dalam proses produksi diperlukan adanya produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja (*division labor*) dan spesialisasi. Menurut Smith, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja (*division labor*) dan spesialisasi memiliki peranan yang penting dalam mendorong proses produksi dikarenakan setiap orang akan lebih berkonsentrasi dalam mengerjakan bidangnya sehingga tenaga kerja tersebut akan lebih ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut, mengurangi terbuangnya waktu ketika terjadi perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dan mampu mendorong ditemukannya

teknologi yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas proses produksi.

Akumulasi modal yang dimiliki memiliki peranan yang paling penting diantara aspek lainnya. Hal ini dikarenakan akumulasi modal memiliki peran aktif sebagai pendorong peningkatan tingkat output dalam proses produksi. Dalam proses pembangunan akumulasi modal diimplikasikan sebagai dana pembangunan yang mampu menentukan cepat atau lambatnya proses pembangunan. Akumulasi modal yang dimiliki setiap daerah menurut Smith ditentukan oleh jumlah tabungan masyarakat. Selain itu, jumlah tabungan masyarakat ditentukan oleh siapa yang memiliki modal tersebut. Menurut Smith, pihak yang memiliki modal tersebut adalah para pengusaha dan tuan tanah.

Aspek kedua yang menjadi pokok pemikiran Adam Smith adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan produktivitas, semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk akan mendorong adanya perluasan pasar yang pada akhirnya akan menciptakan spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi dipandang dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi karena penduduk tersebut dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi terfokus pada satu jenis pekerjaan sehingga tercipta suatu efisiensi produksi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ahli ekonomi selanjutnya yang berperan besar dalam menyumbangkan pemikirannya tentang pertumbuhan ekonomi adalah David Ricardo. David Ricardo adalah ahli ekonomi yang muncul setelah Adam Smith. Ketertarikannya pada kajian ekonomi berawal setelah membaca buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith. Kesamaan pemikiran antara David Ricardo dengan Adam Smith adalah terletak pada pentingnya faktor modal dan tenaga kerja dalam perekonomian. Tenaga kerja

dipandang menjadi hal yang mampu mempercepat produktivitas melalui percepatan proses produksi. Unsur tenaga kerja dalam perekonomian kemudian dikembangkan oleh David Ricardo menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi (*theory relative prices*).

Secara garis besar terdapat kesamaan konsep pemikiran antara ahli ekonomi aliran klasik (Arsyad, 2010:70-71). Kesamaan pemikiran tersebut adalah

1. Kebijakan pasar bebas (*laissez faire*)
2. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam menjalankan sebuah kegiatan ekonomi
3. Permintaan dan penawaran di pasar digunakan sebagai landasan dalam menentukan tingkat upah, tingkat laba, tingkat sewa tanah dan nilai harga barang

Menurut teori Klasik terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui pendekatan mikro dan makro. Berdasarkan pendekatan mikro, barang modal merupakan determinan dari output dalam fungsi produksi. Fungsi produksi tersebut adalah sebagai berikut.

$$Q = f(K, L)$$

Di mana :

- Q = output
K = barang modal
L = tenaga kerja

Sedangkan pendekatan makro merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi produksi pendekatan mikro. Sehingga fungsi produksinya adalah sebagai berikut.

$$Q = f(K, L, T, U, M, W, I)$$

Di mana :

Q = output atau PDB

K = barang modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

U = uang

M = manajemen

W = kewirausahaan

I = informasi

2.2.2 Teori Keynesian

Teori Keynesian berupaya untuk mengkritik teori klasik yang menyebutkan bahwa perekonomian akan selalu menuju ke keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan yang dimaksud adalah antara permintaan dan penawaran adalah sama. Dengan kata lain apabila terjadi kelebihan penawaran (barang yang ditawarkan melebihi barang yang diminta) hal itu akan berlangsung secara sementara.

Keynes juga mengkritik pandangan kaum klasik yang mempercayai bahwa dalam perekonomian tidak perlu adanya campur tangan pemerintah atau adanya kebijakan pasar bebas (*laissez faire*). Menurut teori ini perlu adanya pihak yang bertugas untuk mengendalikan intervensi swasta yang berlebihan dalam perekonomian. Seperti yang telah diketahui bersama motif utama pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian adalah *profit oriented* atau mencari keuntungan. Jika tidak adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

Persamaan keseimbangan pendapatan regional dengan pendekatan pengeluaran Keynes adalah sebagai berikut :

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i)$$

Dimana Y , C , I , G , X dan M masing-masingnya adalah pendapatan regional (PDRB), konsumsi, investasi, ekspor dan impor, sedangkan i menunjukkan daerah (*region*). Adanya campur tangan pemerintah sangat diperlukan ketika sebuah kegiatan perekonomian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian dapat tercermin dari adanya kebijakan fiskal dan moneter. Pada saat terjadi inflasi pemerintah dapat melakukan intervensi yaitu dengan menarik jumlah uang yang beredar dan meningkatkan pungutan pajak. Selain itu, pada saat terjadi pengangguran pemerintah berintervensi dengan jalan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pengangguranpun dapat berkurang.

Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar adalah ahli ekonomi selanjutnya yang mengembangkan teori Keynes. Teori pertumbuhan Harrod Domar mencoba melengkapi teori Keynes yang pada dasarnya belum menjelaskan permasalahan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam teori Harrod – Domar diungkapkan beberapa syarat agar perekonomian dapat secara mantap tumbuh dan berkembang (*steady growth*). Salah satu syarat penting diantaranya adalah pembentukan modal. Hal ini dikarenakan pembentukan modal atau investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:83). Sementara itu, pembentukan modal tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan atas produksi barang dan jasa melainkan juga akan meningkatkan permintaan masyarakat. Hal ini disebabkan kenaikan atas produksi barang dan jasa tersebut baru akan terjadi apabila terjadi peningkatan atas pengeluaran masyarakat.

Arsyad (2010:84), menyatakan bahwa asumsi - asumsi yang digunakan dalam teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*).

Menurut teori Harrod-Domar terdapat hubungan positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu terdapat keterkaitan yang erat antara investasi dengan tambahan rasio modal-output atau ICOR (*incremental capital output ratio*). ICOR adalah nilai yang menunjukkan seberapa banyak modal yang harus ditambahkan untuk mendapatkan tambahan output sebanyak satu unit. Dengan kata lain ICOR menunjukkan seberapa besar investasi harus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Secara matematis dapat dijelaskan melalui hubungan sebagai berikut :

$$\Delta Y = \alpha \Delta K \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{1}{\alpha} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- Y = output
- K = modal
- α = rasio output barang modal (*capital output ratio = COR*)



2.2.3 Teori Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik adalah teori yang ada setelah teori klasik dan dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor W. Swan sejak tahun 1950-an. Teori pertumbuhan Solow adalah teori yang termasuk dalam teori pertumbuhan Neo Klasik (*Neo Classic Growth Theory*) dan merupakan penjabaran dari teori pertumbuhan klasik (*Classic Growth Theory*). Terdapat batasan – batasan tertentu yang melandasi teori pertumbuhan Solow-Swan, batasan tersebut adalah perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor – faktor produksinya.

Menurut teori ini untuk memajukan pertumbuhan ekonomi terdapat peran yang dominan dari kemajuan teknologi. Sementara itu, di sisi lain juga ada hal lain yang berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut adalah ketersediaan faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud adalah penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi (Arsyad, 2010:87-88). Peranan penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi dalam menjelaskan teori pertumbuhan neoklasik Solow dapat digunakan secara keseluruhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Todaro dan Smith 2006:150).

Sementara itu menurut Mankiw (2006:183), model pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan output perekonomian adalah pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Pada dasarnya persediaan modal merupakan determinan dari output perekonomian. Ketika terjadi perubahan pada persediaan modal maka akan terjadi perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

Solow membangun model pertumbuhannya dengan didasarkan atas beberapa asumsi (Jhingan, 2003:274), yaitu

1. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi
2. Yang dimaksud output ialah output netto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal
3. *Returns to scale* bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produksi adalah homogen pada derajat pertama
4. Dua faktor produksi buruh dan modal, dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka
5. Harga dan upah fleksibel
6. Buruh terpekerjakan secara penuh
7. Stok modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh
8. Buruh dan modal dapat didistribusikan satu sama lain
9. Kemajuan teknik bersifat netral

Model pertumbuhan neoklasik Solow menurut Todaro dan Smith (2006:150), menggunakan fungsi produksi sebagai berikut :

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha}$$

Di mana :

Y : produk domestik bruto;

K : stok modal fisik dan modal manusia;

L : tenaga kerja;

A : produktivitas tenaga kerja.

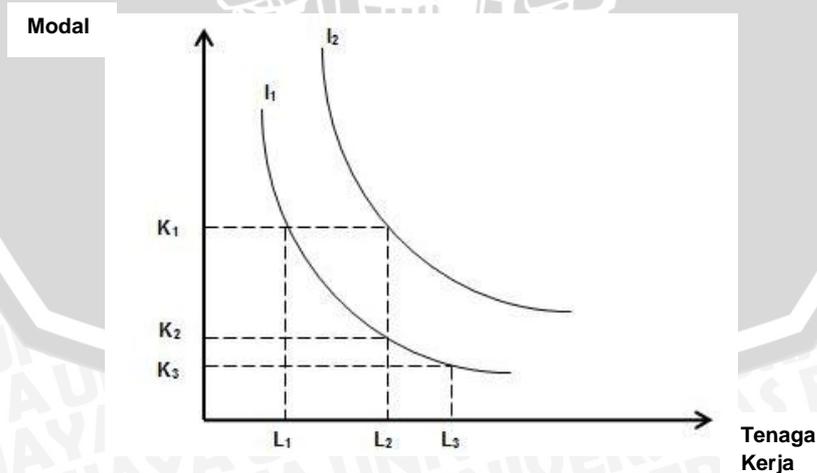
Persamaan di atas memaparkan mengenai teori pertumbuhan neoklasik tradisional (*traditional neoclassical growth theory*) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan output selalu bersumber dari tiga hal yaitu, kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) dan

penyempurnaan teknologi. Kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja tersebut akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Pada saat terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sedangkan stok modal tetap maka yang terjadi adalah akan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan apabila kualitas tenaga kerja (pendidikan) mengalami perbaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan.

Kemudian, untuk memproduksi sejumlah output tertentu dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Misalnya untuk memproduksi satu jenis output dapat menggunakan lebih banyak modal dan sedikit tenaga kerja, ataupun sebaliknya menggunakan lebih sedikit modal dan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio antara kapital dan output (*Capital Output Ratio*) dapat mengalami perubahan.

Perbandingan penggunaan kapital dan tenaga kerja dalam memproduksi output dapat lebih diperjelas dengan adanya Fungsi Produksi Neoklasik sebagai berikut :

Gambar 2.1 Fungsi Produksi Neo Klasik



Sumber : Lincoln Arsyad, 1988

Dari fungsi produksi di atas, untuk memproduksi output sebesar I_1 menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja sebesar K_1, L_1 ; K_2, L_2 dan K_3, L_3 . Sementara itu, ketika ingin memperbesar output ke I_2 dengan modal yang tetap namun tenaga kerja yang bertambah dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja sebesar K_1, L_2 .

2.3 Teori Investasi

Pada dasarnya investasi memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi. Semakin besar investasi yang masuk ke dalam suatu daerah maka semakin besar pula output yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Apabila suatu daerah kurang memiliki modal yang mencukupi maka pertumbuhan daerah tersebut akan terhambat sehingga pada akhirnya pembangunan ekonominya pun juga akan terhambat.

Rahardja dan Manurung (2008:58), investasi adalah pengeluaran – pengeluaran yang meningkatkan persediaan stok barang modal (*capital stock*). Sedangkan yang dimaksud dengan stok barang modal (barang modal tersedia) adalah jumlah barang modal dalam perekonomian pada saat tertentu. Metode perhitungan dari stok barang modal ini adalah dengan mengkalikan jumlah barang modal dengan harga perolehan per unit barang modal.

Teori Rostow dapat digunakan sebagai landasan berpikir bahwa proses pembangunan akan berjalan lebih cepat apabila terdapat peran serta dari akumulasi modal. Akumulasi modal itu sendiri memiliki hubungan yang positif dengan jumlah tabungan. Apabila jumlah tabungan meningkat maka akumulasi modal atau investasi juga akan mengalami peningkatan. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebagai akibat dari pendapatan nasional yang juga mengalami peningkatan.

Dalam penelitian ini jenis investasi yang dimaksud adalah kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum ke setiap provinsi di Pulau Jawa-Bali. Menurut Fahmi (2008:53), fungsi kredit dalam perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Fungsi kredit sebagai sarana untuk menghindari pemusatan finansial

Pemusatan finansial dapat terjadi apabila jumlah uang yang beredar hanya terpusat di satu daerah saja. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Melalui penyaluran kredit ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat menyebar ke daerah-daerah lain sehingga pertumbuhan ekonomi juga dapat merata.

2. Fungsi kredit untuk menciptakan pemerataan pendapatan

Penyaluran kredit dapat membantu para pengusaha dalam proses perluasan usahanya seperti pembukaan cabang baru. Dengan berkembangnya bisnis dari para pengusaha tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di tempat lain. Sehingga pendapatan masyarakat di daerah lain juga akan meningkat, tidak hanya di daerah tempat perusahaan pusat itu saja.

3. Fungsi kredit sebagai pendorong stabilitas ekonomi

Kredit dapat menjadi salah satu instrumen yang mampu memberikan solusi pada saat perekonomian suatu negara sedang tidak stabil. Seperti mengendalikan inflasi, membuka lapangan pekerjaan, mendorong kegiatan usaha seperti ekspor dan impor.

Kredit investasi yang diberikan oleh Bank Umum dirasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini bisa terjadi karena aliran modal yang masuk langsung digunakan untuk proses pembangunan daerah dan efeknya akan dirasakan sendiri oleh daerah yang menerima akumulasi modal bukan kembali lagi ke pemilik modal atau pihak

bank. Kredit investasi adalah kredit jangka panjang atau jangka menengah yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang modal seperti pembelian mesin, tanah, bangunan dan kendaraan yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk pendirian, perluasan, modernisasi dan rehabilitasi proyek. Sistem pelunasan dari kredit investasi ini adalah berasal dari hasil usaha dengan barang modal yang dibiayai.

2.3.1 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith memberikan pernyataan bahwa akumulasi modal atau investasi adalah aspek terpenting diantara aspek Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010:70-71). Sementara itu menurut Rostow pembangunan akan berjalan lebih cepat dengan adanya peran serta dari akumulasi modal. Sehingga investasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

2.4 Teori Ekspor

Teori Keynes menyebutkan bahwa ekspor merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka (perekonomian empat sektor) dimana pemerintah terlibat di dalamnya (Mankiw, 2006:63). Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Pada saat terjadi perubahan nilai ekspor maka secara langsung pendapatan masyarakat juga akan mengalami perubahan. Secara umum pengertian ekspor itu sendiri adalah perdagangan barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat dalam satu daerah kepada daerah lain.

Menurut Todaro dan Smith (2006:94), ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang dapat mendorong kegiatan perekonomian negara sedang berkembang agar setaraf dengan negara maju. Dengan adanya perdagangan ini akan meningkatkan permintaan berupa barang dan jasa dalam negeri dan akan mendorong timbulnya industri besar namun harus diiringi dengan keadaan politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel.

Ekspor termasuk ke dalam salah satu pos transaksi yang terdapat di neraca pembayaran. Menurut Putong (2013:281), neraca pembayaran (*balance of payment*) adalah ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dinyatakan dalam uang. Di dalam neraca pembayaran itu sendiri terdapat beberapa hal yang menyusunnya, diantaranya adalah neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, transaksi modal, dan lalu lintas moneter.

Pada dasarnya terdapat dua jenis ekspor di Indonesia, yaitu ekspor migas dan non migas. Ekspor migas adalah ekspor yang berhubungan dengan barang tambang yang berupa minyak dan gas bumi. Sedangkan ekspor non migas adalah ekspor yang berhubungan dengan barang yang bukan minyak dan gas bumi seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan semua hasil pertambangan yang bukan minyak dan gas bumi.

Kegiatan ekspor memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah ekspor dapat memanfaatkan secara penuh sumber daya domestik sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Hal ini selanjutnya akan berdampak pada pembagian tenaga kerja (*division of labor*) yang akhirnya akan berdampak pada efisiensi produksi. Kemudian, ekspor dapat berdampak pada perluasan pasar baik itu pasar domestik maupun pasar di luar negeri dan ekspor juga dapat menjadi daya tarik mengalirnya modal dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Sementara itu, dampak negatifnya

adalah bagi negara yang sedang berkembang akan berakibat pada semakin rentannya terhadap fluktuasi perekonomian dunia.

Ekspor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh daerah khususnya provinsi dengan negara lain. Apabila suatu daerah melakukan kegiatan ekspor, maka permintaan akan barang dan jasa daerah tersebut akan meningkat. Hal tersebut secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan ekspor. Begitupun sebaliknya, daerah yang kegiatan ekspornya rendah maka permintaan akan barang dan jasa daerah tersebut juga rendah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah.

2.4.1 Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006:94), pertumbuhan ekonomi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didorong dengan jalan menerapkan kebijakan internasional yang pro ke luar. Sistem perekonomian terbuka yang bebas dan meminimalkan hambatan perdagangan akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perekonomian tertutup.

2.5 Teori Produktivitas

Menurut Suprihanto dalam Haryani (2002:97), produktivitas merupakan kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber ekonomi yang dimaksud adalah faktor produksi yang terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja dan bahan baku. Metode penghitungan produktivitas adalah sebagai berikut.

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Output = barang dan jasa yang dihasilkan

Input = faktor produksi yang digunakan (tanah, modal, tenaga kerja dan bahan baku)

Faktor produksi yang sering dihitung produktivitasnya adalah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mencerminkan sebuah kemampuan dari tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa dalam jumlah tertentu. Menurut Haryani (2002:101), dalam menganalisis sebuah produktivitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis mikro dan analisis makro.

2.5.1 Analisis Mikro

Analisis produktivitas mikro adalah metode analisis produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan analisis produktivitas ini perusahaan akan membandingkan produktivitas yang dimilikinya dari tahun ke tahun. Tujuan dari dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat produktivitas tenaga kerja di perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan pedoman untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, ketika telah diketahui faktor yang menghambat produktivitas tenaga kerja tersebut selanjutnya dicarikan penyelesaian terbaik atas faktor penghambat tersebut.

2.5.2 Analisis Makro

Analisis produktivitas makro dapat digunakan untuk skala industri maupun skala nasional. Untuk skala industri produktivitasnya dapat dilihat dengan membandingkan produktivitas perusahaan dibandingkan dengan produktivitas rata-rata industri. Apabila produktivitas perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri maka perusahaan tersebut memiliki daya saing yang kuat. Begitupun sebaliknya apabila produktivitas perusahaan lebih rendah

dibandingkan rata-rata produktivitas industri maka perusahaan tersebut memiliki daya saing yang rendah.

Di penelitian ini analisis produktivitas yang digunakan adalah analisis produktivitas makro. Selanjutnya analisis produktivitas makro ini dapat dipersempit analisisnya berdasarkan sektor ekonomi. Menurut Haryani (2002:102), tinggi rendahnya produktivitas dalam skala makro atau nasional dapat diketahui melalui dua indikator yaitu kualitas dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu tinggi rendahnya produktivitas makro berdasarkan sektor ekonomi dapat diketahui melalui tinggi rendahnya sumbangan sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut.

Jenis sektor ekonomi menurut lapangan usaha dapat dibagi menurut beberapa sektor yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, dll. Dalam penelitian ini akan berfokus pada sektor pertanian dan sektor industri. Berdasarkan teori perubahan struktural yang diungkapkan oleh Hollis Chenery (Kuncoro, 2006:64), akan terjadi *trade off* antara peran sektor industri dan sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Pada saat pendapatan perkapita mengalami peningkatan maka pangsa pasar dari sektor industri meningkat namun pangsa pasar dari sektor pertanian mengalami penurunan.

Hal di atas sejalan dengan produktivitas tenaga kerja yang berada di sektor tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Ahmad (1990) dalam Syamsudin HM (1998), produktivitas tenaga kerja sektor dapat dihitung melalui hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu sektor perekonomian, yaitu menggunakan output ekonomi (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Menurut Su (2011) dalam penelitiannya, faktor-faktor yang

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja diantaranya adalah saham, investasi dalam aktiva tetap, volume total bisnis pos dan telekomunikasi, keuntungan perusahaan, dan upah rata-rata tenaga kerja ekonomi. Sementara itu produktivitas tenaga kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.5.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Teori dualisme Lewis memberikan penjelasan bahwa di sektor pertanian produktivitas tenaga kerjanya cenderung rendah (Kuncoro, 2006:58). Hal ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang rendah namun kuantitas tenaga kerjanya relatif banyak. Sehingga terjadi surplus tenaga kerja dengan ditandai oleh nilai produk marginal (*marginal product*) tenaga kerja yang bernilai nol.

Kondisi tenaga kerja sektor pertanian di atas berarti bahwa fungsi produksi pada sektor pertanian telah mencapai kondisi berlakunya hukum *law of diminishing return*. Pengurangan jumlah tenaga kerja tidak akan menyebabkan menurunnya jumlah output yang diproduksi. Sedangkan penambahan jumlah tenaga kerja tidak akan meningkatkan jumlah output yang diproduksi melainkan akan menurunkan total produksi yang ada.

2.5.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri

Kuncoro (2006:58) menjelaskan mengenai teori pembangunan Arthur Lewis yang menyebutkan adanya tingkat produktivitas yang tinggi pada input sektor industri, termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja. Nilai dari produk marginal tenaga kerja pada sektor industri masih bernilai positif. Sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini akan meningkatkan tingkat produksi yang ada. Sedangkan penurunan dalam jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat produksi pada sektor tersebut.

2.5.3 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Peran penting faktor tenaga kerja dalam perekonomian dijelaskan oleh David Ricardo yang merupakan salah satu ahli ekonomi dari mazhab klasik. Pada dasarnya produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Kedua hal tersebut selain dapat meningkatkan produktivitas juga mampu menghambat adanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*). Sehingga proses pertumbuhan dapat terjadi dari hasil dari tarik menarik antara hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*) dengan kemajuan teknologi (Arsyad, 2010:79-81).

Hubungan produktivitas tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui sudut pandang neoklasik Solow. Teori tersebut merupakan hasil pengembangan dari teori pertumbuhan Harrod Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Perbedaan antara teori pertumbuhan Harrod Domar dan teori pertumbuhan neoklasik selain yang disebutkan di atas yaitu jika teori Harrod Domar mengisyaratkan adanya skala hasil tetap dengan koefisien baku, teori pertumbuhan neoklasik Solow menjelaskan adanya skala hasil yang berkurang (*the law of diminishing returns*) dari tenaga kerja dan modal apabila dilakukan analisis secara terpisah (Todaro dan Smith, 2006:150).

2.5.3.1 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori dualisme Lewis dapat dijadikan landasan berfikir mengenai hubungan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa produktivitas tenaga kerja sektor pertanian memiliki produk marginal (*marginal product*) sama dengan

nol. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut adalah rendah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian tersebut pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya pendapatan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh sektor pertanian. Sehingga mengakibatkan tingkat hidup tenaga kerja di sektor ini berada pada kondisi subsisten.

2.5.3.2 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai hubungan antara produktivitas tenaga kerja sektor industri dengan pertumbuhan ekonomi juga dapat dijelaskan melalui teori dualisme Lewis. Menurut teori Lewis ini produktivitas tenaga kerja sektor industri adalah cukup tinggi. Hal ini disebabkan produk marginal (*marginal product*) bernilai positif. Pada saat produktivitas tenaga kerja tinggi maka akan berdampak pada tingginya pendapatan dan tingginya pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh sektor industri.

2.6 Teori Ketimpangan Ekonomi

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebelumnya pernah dijelaskan oleh Douglas C. North yang dikenal dengan Hipotesa Neo Klasik. Pada tahap awal pembangunan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi tetapi ketika keadaan perekonomian sudah mulai stabil ketimpangan tersebut akan mulai menurun. Kondisi ketimpangan pada tahap awal pembangunan dapat terjadi karena proses pembangunan tersebut hanya dapat dinikmati oleh daerah yang kondisi perekonomian dan kondisi infrastrukturnya sudah baik. Sedangkan di sisi lain, daerah yang kondisi perekonomian dan kondisi infrastrukturnya kurang baik

tidak dapat mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang sedang berlangsung. Menurut Sjafrizal (2008:106) hambatan proses pembangunan tidak hanya berasal dari faktor ekonomi melainkan juga berasal dari faktor sosial dan budaya.

Daerah yang mampu menjangkau proses pembangunan tersebut secara tidak langsung pertumbuhan ekonominya akan terdorong. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Hal yang perlu digaris bawahi tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah mapan adalah hanya tenaga kerja yang memiliki keahlian atau tenaga kerja terdidiklah yang dapat terserap. Sedangkan tenaga kerja yang tidak terdidik akan tetap menyandang status sebagai pengangguran atau masuk ke sektor informal.

Yustika (2002:191), pertumbuhan terjadi karena ada transfer sumber – sumber ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Penduduk yang memiliki pendidikan tinggi akan terserap ke sektor modern dan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang berbasis sektor modern tersebut. Sedangkan, penduduk yang memiliki pendidikan rendah akan tetap berada di sektor tradisional dan daerah yang berbasis sektor tradisional tersebut akan semakin sulit terdorong. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kerja yang masuk ke sektor modern memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi sebagai pengaruh dari pendidikan yang tinggi. Di sektor tradisional yang terjadi adalah hal sebaliknya, tenaga di sektor tradisional memiliki tingkat produktivitas yang rendah sebagai akibat dari pendidikan yang rendah sehingga tenaga kerja tersebut kurang dapat bekerja secara efisien.

Terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan struktural dalam perekonomian. Model pertumbuhan struktural

memusatkan perhatiannya pada mekanisme transformasi struktur perekonomian negara yang masih terbelakang dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern. Ahli ekonomi yang mendukung model ini adalah W. Arthur Lewis. Hasil pemikiran W. Arthur Lewis dikenal dengan model dua sektor Lewis. Model ini menitikberatkan pada proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Laju atau kecepatan perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern (Todaro dan Smith, 2006:132).

Model Lewis dapat membantu menjelaskan tentang fenomena memburuknya distribusi pendapatan pada tahap awal pembangunan. Awalnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat namun peningkatannya hanya terpusat di sektor modern yang notabene merupakan *non-tradable sector*. Sektor modern menjadi sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor ini memiliki produktivitas dan penyerapan investasi yang tinggi namun di sisi lain, penyerapan tenaganya rendah (Todaro dan Smith, 2006:254). Demi lebih memacu pertumbuhan ekonomi, akibatnya ada sektor yang harus dikorbankan yaitu sektor tradisional yang pada dasarnya termasuk dalam *tradable sector* yang memiliki produktivitas yang rendah dan lebih memajukan sektor modern yang pada dasarnya memiliki produktivitas yang tinggi.

Sementara itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan hal pendukung lain seperti perluasan kesempatan kerja agar distribusi pendapatan yang merata dapat terwujud. Apabila masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap kesempatan kerja maka secara tidak langsung akan semakin besar kontribusi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan. Sehingga adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak

hanya disumbang oleh sebagian kecil masyarakat saja melainkan oleh sebagian besar masyarakat.

Menurut Halim (2012:109), dalam bukunya yang berjudul Teori Ekonomika, strategi pembangunan ekonomi dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu

1. Output meningkat
2. *Full employment*, yaitu tidak ada atau berkurangnya pengangguran sumber daya atau faktor-faktor produksi
3. Ketimpangan (*gap*) menurun
4. Perubahan sikap mental masyarakat, artinya yang semula selalu merintang pembangunan menjadi mendukung pembangunan.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Diantaranya adalah kurva Lorenz, koefisien Gini, *Williamson Index* dan *Theil Index*. Namun terdapat perbedaan dalam penggunaannya, untuk Kurva Lorenz dan koefisien Gini digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan perorangan sedangkan *Williamson Index* dan *Theil Index* digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2008:108).

Ahli ekonomi yang berkontribusi dalam menyumbangkan pemikirannya tentang pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah adalah Jeffrey G. Williamson pada tahun 1956. Hasil dari penelitian Williamson adalah pada tahap awal pembangunan, akan timbul permasalahan ketimpangan namun dalam jangka panjang akan terjadi hal sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Williamson ini dilakukan di negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan data *cross section* (Sjafrizal,2008:106).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Williamson Index* untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah karena yang menjadi

fokus dalam penelitian adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Metode penghitungan *Williamson Index* adalah sebagai berikut,

$$V_w = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}{y}$$

Di mana :

- V_w = Indeks Williamson
- y_i = PDRB perkapita daerah i
- y = PDRB perkapita rata – rata seluruh daerah
- f_i = jumlah penduduk daerah i
- n = jumlah penduduk seluruh daerah

Kriteria perhitungan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah sebagai berikut :

1. Indeks < 0,3 , ketidakmerataannya tergolong rendah
2. Indeks 0,4 – 0,5 , ketidakmerataannya tergolong sedang
3. Indeks 0,7 – 1 , ketidakmerataan tergolong tinggi
4. Indeks > 1, ketidakmerataannya sangat tinggi

Menurut Sjafrizal (2008:117-120) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
5. Alokasi dana pembangunan wilayah

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad (1988:58), mengungkapkan terdapat 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara – negara yang sedang berkembang, yaitu :

1. penambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita;
2. inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang;
3. ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*),
5. rendahnya mobilitas sosial
6. pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. memburuknya nilai tukar (*terms of trade*) bagi negara–negara yang sedang berkembang dalam perdagangan negara maju
8. hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Selain Jeffrey G. Williamson yang memberikan kontribusinya dalam penghitungan ketimpangan ekonomi antar wilayah, Leo Klassen memperkenalkan model untuk mengidentifikasi daerah tertinggal yang dikenal dengan tipologi klassen. Tipologi klassen merupakan suatu metode yang menggunakan pendapatan sebagai metode dasar pengklasifikasiannya. Pertama adalah dengan membandingkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Kedua adalah dengan membandingkan tingkat pendapatan daerah dengan tingkat pendapatan nasional.

Tabel 2.1 **Tipologi Klassen untuk Pengidentifikasian Daerah Tertinggal**

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dibandingkan dengan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Nasional	Tingkat Pendapatan Daerah Dibandingkan dengan Tingkat Pendapatan Nasional	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Tipe I Daerah maju	Tipe II Daerah maju tetapi tertekan
Rendah (<1)	Tipe III Daerah berkembang	Tipe IV Daerah tertinggal

Sumber : Lincolin Arsyad, 2010

1. Kuadran I, disebut juga dengan daerah makmur. Daerah yang berada dalam kategori ini memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi di atas rata – rata pendapatan perkapita dan rata – rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali
2. Kuadran II, disebut juga dengan daerah maju tetapi tertekan. Daerah yang berada dalam kategori ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa-Bali tetapi memiliki pendapatan perkapita di bawah pendapatan per kapita rata-rata Pulau Jawa-Bali
3. Kuadran III, disebut juga dengan daerah berkembang. Daerah yang termasuk dalam kategori ini memiliki pendapatan perkapita di atas pendapatan per kapita rata-rata Pulau Jawa-Bali tetapi meiliki laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali
4. Kuadran IV, disebut juga dengan daerah relatif terbelakang. Daerah yang termasuk dalam kategori ini memiliki pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali.

Daerah yang termasuk dalam kategori IV yaitu daerah tertinggal akhirnya akan kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Daya saing dan

produktivitas yang rendah menjadikan daerah tersebut kurang kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Produktivitas yang rendah lebih disebabkan oleh tenaga kerja yang pendidikannya rendah dan kurang terampil sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi sektor modern. Selanjutnya, daya saing yang rendah disebabkan oleh faktor kepemilikan sumber daya alam. Daerah yang memiliki keberlimpahan sumber daya alam yang berlimpah khususnya di sektor migas akan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

2.6.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006:253), Kuznets sebelumnya telah meneliti tentang adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan. Penelitian Kuznets tersebut terkenal dengan hipotesis U terbalik. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang tinggi pula. Namun setelah jangka waktu lebih panjang ketimpangan tersebut akan mengalami penurunan atau pemerataan akan semakin tercapai.

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi juga pernah dilakukan oleh Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006). Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara PDB dengan ketimpangan di negara Uni Eropa dengan menggunakan model ekonometrik. Hasilnya adalah negara yang tergabung dalam Uni Eropa tersebut memiliki pola ketimpangan wilayah berbentuk “U” terbalik. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuznets.

2.6.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Ekonomi

Ahli ekonomi dari mazhab Keynesian yaitu Harrod Domar telah menjelaskan mengenai hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila alokasi investasi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula. Daerah yang alokasi investasinya tinggi maka pertumbuhan ekonominya akan tinggi. Sedangkan daerah yang alokasi investasinya rendah maka pertumbuhan ekonominya juga akan rendah. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan timbulnya permasalahan ketimpangan. Menurut Yustika (2002:97), salah satu faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah terdapat perbedaan alokasi sumberdaya dan faktor produksi yang dimiliki masing – masing daerah. Faktor produksi yang dimaksud adalah seperti tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan antar wilayah.

2.6.3 Hubungan Ekspor terhadap Ketimpangan Ekonomi

Penelitian mengenai hubungan ekspor dengan ketimpangan ekonomi sebelumnya pernah dilakukan oleh Rui Hao dan Zheng Wi (2007) yang berjudul “*Fundamental Causes of Inland Coastal Inequality in Post Reform China*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara liberalisasi perdagangan yang diukur melalui ekspor dan impor terhadap ketimpangan ekonomi setelah reformasi di China. Sedangkan sebelum masa reformasi pengaruhnya adalah negatif dan tidak signifikan antara liberalisasi perdagangan yang diukur melalui ekspor dan impor terhadap ketimpangan ekonomi di China.

2.6.4 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Ekonomi

Menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor pertanian akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga pada akhirnya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi pada sektor tradisional yaitu sektor pertanian akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke atas atau menuju garis pemerataan.

2.6.5 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Ekonomi

Menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor modern yaitu sektor industri akan menghasilkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata atau terjadi kesenjangan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi yang berasal dari sektor industri akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke bawah atau menjauhi garis pemerataan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Eustáquio Reis (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Spatial Income Inequality in Brazil 1872 – 2000*, meneliti tentang ketimpangan ekonomi wilayah dengan menggunakan data kota – kota di Brazil selama tahun 1872 – 2000. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membuktikan konvergensi pertumbuhan ekonomi dari pendapatan perkapita dan produktivitas tenaga kerja antara satu daerah dengan daerah lainnya. Langkah penelitiannya adalah dengan memisahkan model untuk aktivitas perkotaan dan pedesaan,

mengasumsikan hubungan spasial antar variabel dalam model dan memperluas model untuk memperhitungkan penentu jangka panjang dari konvergensi pertumbuhan wilayah. Hasil utama dari penelitian ini adalah ketimpangan wilayah khususnya dalam kegiatan ekonomi, pendapatan per kapita dan produktivitas tenaga kerja tetap praktis tidak berubah dari 1872 ke 2000. Selain itu, hasil estimasi model ekonometrika untuk konvergensi pertumbuhan adalah kecepatan konvergensi pendapatan perkapita dan produktivitas tenaga kerja sangat lambat jika dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, konvergensi produktivitas tenaga kerja lebih cepat di kegiatan perekonomian perkotaan daripada kegiatan perekonomian pedesaan.

Stephen J. Turnovsky (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Economic Growth and Inequality: The Role of Public Investment* meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada investasi pemerintah sebagai determinan dari hubungan antara akumulasi modal fisik dan ketimpangan pendapatan. Hasilnya adalah pengeluaran pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kekayaan atau ketimpangan pendapatan. Investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta. Dengan meningkatnya produktivitas modal swasta, ketimpangan antara agen atau pelaku ekonomi lebih besar daripada ketimpangan antar tenaga kerja. Sehingga hal tersebut cenderung meningkatkan ketimpangan kekayaan atau ketimpangan pendapatan.

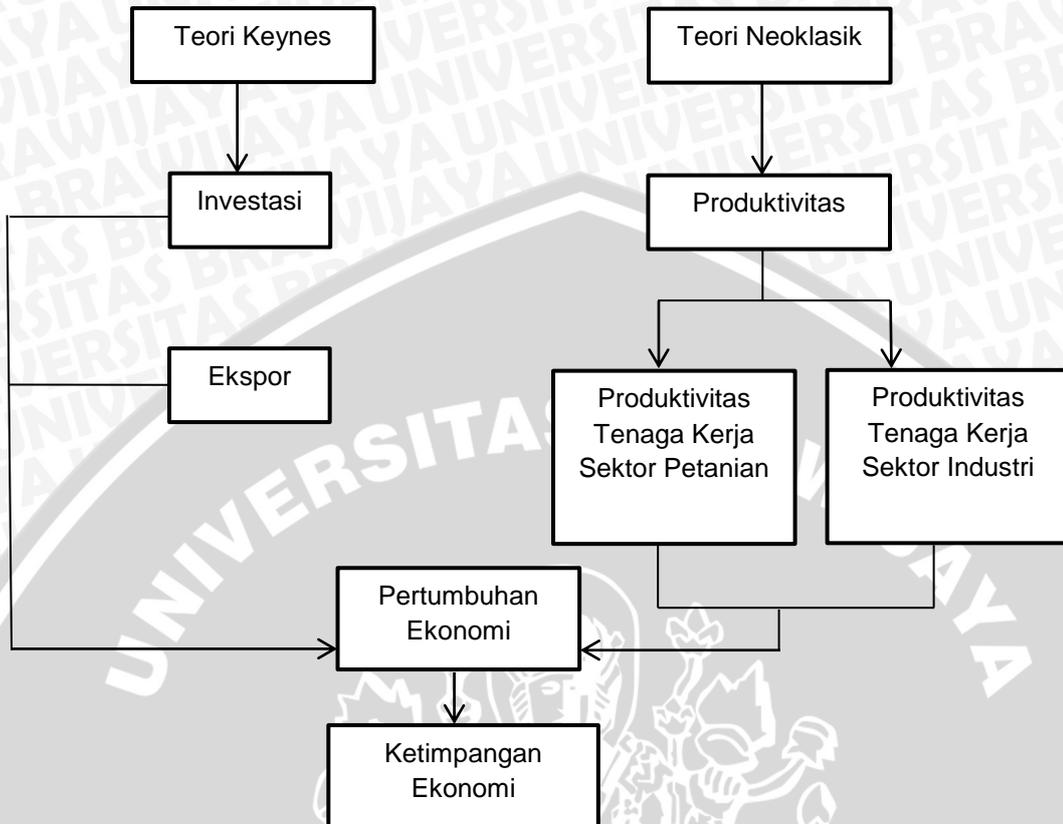
Amir Rubin dan Simon Fraser (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US* menganalisis tentang hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan di US selama pasca perang yaitu tahun 1953-2008. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena pendapatan masyarakat golongan atas berasal dari

kekayaan yang mereka miliki, yang pada dasarnya bersifat lebih sensitif terhadap pertumbuhan daripada pendapatan yang berasal dari tenaga kerja. Selain itu, pendapatan masyarakat golongan atas juga berasal dari hasil kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan (*equity compensation*), yang pada dasarnya juga sensitif terhadap pertumbuhan.

Jin Yinglan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *International Trade And Income Distribution in China* meneliti tentang hubungan perdagangan internasional dengan distribusi pendapatan di Cina. Hasil penelitiannya adalah pada awalnya perdagangan internasional meningkatkan pendapatan perkapita namun setelah itu terjadi perluasan kesenjangan pendapatan antar daerah dan berbagai bidang industri di Cina. Sementara itu untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendapatan antar daerah tersebut di antaranya adalah diperlukan adanya inovasi teknis dan meningkatkan *skill* pekerja.

Dierk Herzer and Peter Nunnenkamp (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Inward and Outward FDI and Income Inequality: Evidence From Europe*, meneliti tentang pengaruh keluar dan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap ketimpangan pendapatan di Eropa. Hasilnya adalah dalam jangka panjang, terdapat pengaruh negatif dari keluar dan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap ketimpangan pendapatan di Eropa sedangkan dalam jangka pendek, pengaruhnya adalah positif. Kemudian, dalam jangka panjang, terdapat hubungan sebab akibat yang terjadi dalam dua arah yaitu peningkatan keluar dan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi penurunan pada ketimpangan pendapatan akan meningkatkan keluar dan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). Namun dalam jangka panjang, untuk beberapa negara terdapat perbedaan pengaruh keluar masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap ketimpangan pendapatan, yaitu pengaruhnya adalah positif.

2.8 Kerangka Pemikiran



Sumber : Berbagai sumber,diolah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk melakukan sebuah proses pembangunan. Menurut Schumpeter dalam Putong (2013:411), pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Setelah pertumbuhan ekonomi mampu dicapai timbul permasalahan yang mengiringinya yaitu ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hanya mampu dicapai oleh beberapa daerah. Dengan kata lain beberapa daerah dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga timbul suatu daerah yang dikategorikan sebagai daerah maju (*developed region*) dan daerah terbelakang (*underdeveloped region*).

Menurut teori Keynes dan teori Neoklasik pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui beberapa faktor. Dalam teori Keynes disebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran serta dari investasi dan perdagangan luar negeri (ekspor). Sedangkan menurut teori neoklasik pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui tiga instrumen, yaitu melalui persediaan modal, tenaga kerja dan teknologi. Dalam penelitian ini kontribusi tenaga kerja dilihat dari seberapa besar produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori dualisme Lewis bahwa terdapat perbedaan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dan sektor industri.

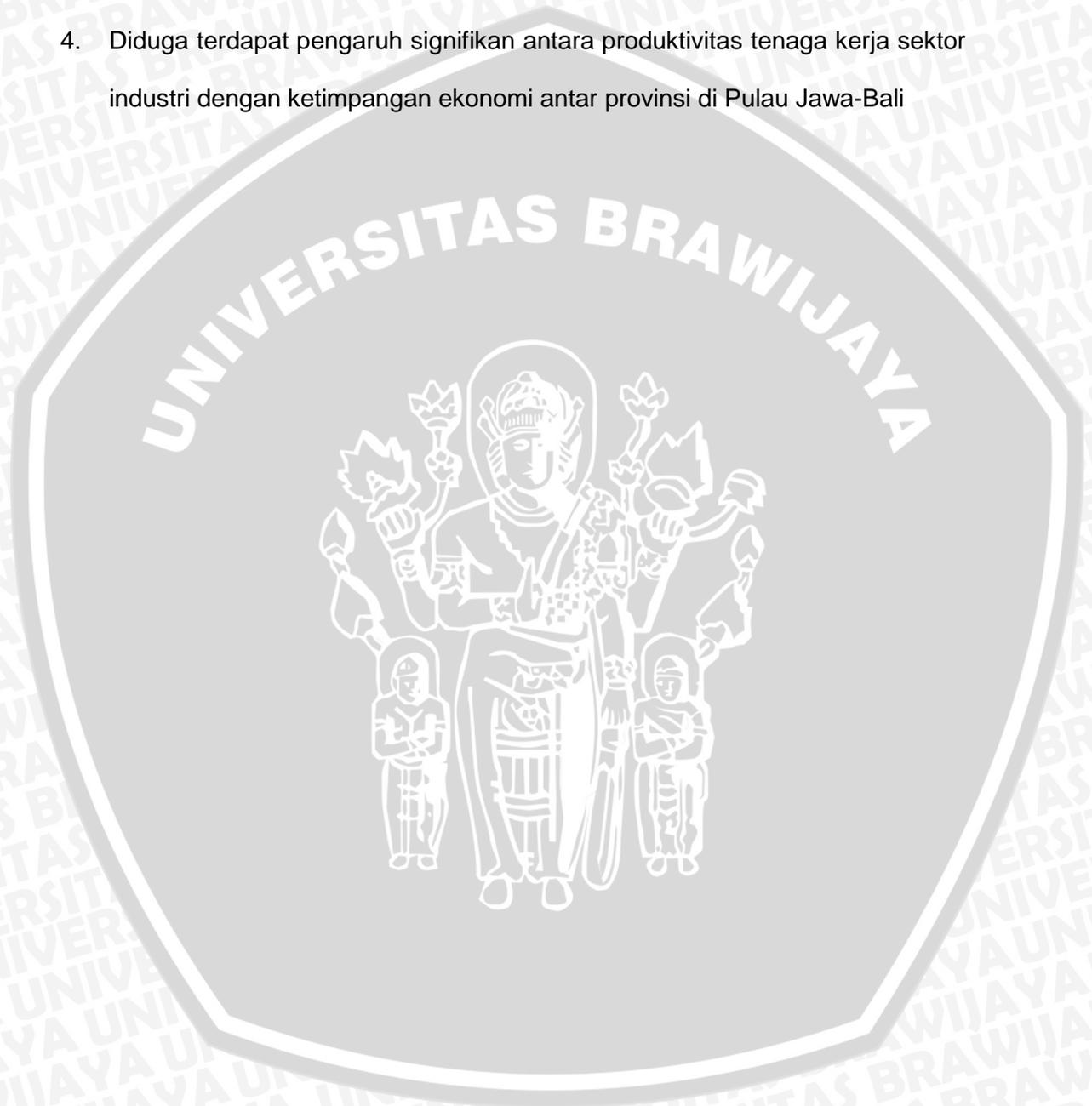
Sehingga menurut teori Keynes ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat terjadi karena terdapat perbedaan besarnya investasi antar wilayah, dan ekspor antar wilayah. Sedangkan menurut teori neoklasik ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat terjadi karena terdapat perbedaan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri. Dengan demikian dalam penelitian ini diduga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah yaitu kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri.

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara kredit investasi dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali

2. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ekspor non migas dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali
3. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali
4. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara produktivitas tenaga kerja sektor industri dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan secara empiris pengaruh kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 - 2013. Sehingga digunakan metode analisis data panel untuk membuktikan hal tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di tujuh provinsi di Pulau Jawa – Bali, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Sementara waktu penelitiannya adalah berkisar antara tahun 2005 hingga 2013.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kredit Investasi

Kredit investasi dalam penelitian ini adalah besarnya kredit yang disalurkan oleh Bank Umum dengan tujuan penggunaan investasi. Data kredit investasi tersebut didapat dari Bank Indonesia yang dinyatakan dalam rupiah.

2. Ekspor Non Migas

Ekspor non migas dalam penelitian ini adalah besarnya komoditas ekspor di luar minyak dan gas seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan dan



pertambangan di masing-masing provinsi di Pulau Jawa-Bali. Data ekspor daerah ini didapat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian

Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dalam penelitian ini adalah hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap tenaga kerja di sektor pertanian. Data produktivitas ini dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja.

4. Produktivitas tenaga kerja sektor industri

Produktivitas tenaga kerja sektor industri dalam penelitian ini adalah hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri terhadap jumlah tenaga kerja di sektor industri. Data produktivitas ini dinyatakan dalam rupiah per tenaga kerja.

5. Ketimpangan ekonomi antar provinsi

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Data ketimpangan ekonomi antar provinsi tersebut dinyatakan dalam indeks dimana skala pengukurannya adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks $< 0,3$, ketidakmerataannya tergolong rendah
- 2) Indeks $0,4 - 0,5$, ketidakmerataannya tergolong sedang
- 3) Indeks $0,7 - 1$, ketidakmerataan tergolong tinggi
- 4) Indeks > 1 , ketidakmerataannya sangat tinggi

3.3.2 Variabel dalam Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. *Dependent variable* (variabel terikat), yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh

independent variable (variabel bebas). Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam *dependent variable* adalah ketimpangan ekonomi antar provinsi.

2. *Independent variable* (variabel bebas), yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel apapun atau variabel yang nilainya mempengaruhi *dependent variable* (variabel terikat). Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam *Independent variable* adalah kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Data yang digunakan diklasifikasikan berdasarkan daerah dan tahun penelitian. Sementara itu data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yaitu berasal dari buku, jurnal, dan berbagai publikasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data pendapatan perkapita per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
2. Data pendapatan perkapita Indonesia tahun 2005 hingga 2013
3. Data jumlah penduduk per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
4. Data jumlah penduduk Indonesia tahun 2005 hingga 2013
5. Data kredit investasi per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013

6. Data ekspor non migas per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
7. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian per provinsi di Pulau Jawa – Bali tahun 2005 hingga 2013
8. Data jumlah tenaga kerja di sektor pertanian per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
9. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
10. Data jumlah tenaga kerja sektor industri per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga tahun 2013
11. Data pertumbuhan ekonomi per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013
12. Data ketimpangan ekonomi per provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005 hingga 2013

Data tersebut didapat dari Bank Dunia (*World Bank*), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistika (BPS), dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

3.6 Metode Analisis

Jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data panel. Data panel secara sederhana dapat diartikan sebagai data yang memiliki dimensi ruang dan waktu (Gujarati dan Porter, 2012:235). Ruang yang dimaksud adalah data kerat lintang (*cross section*) dan waktu yang dimaksud adalah data runtut waktu (*time series*). Terdapat berbagai macam istilah dari data panel yaitu data *pooled*, kombinasi data runtut-waktu dan individual, data micropanel, data longitudinal dan analisis cohort. Meskipun terdapat perbedaan istilah, model regresi yang menggunakan data semacam ini dapat disebut dengan model regresi data panel.

Terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan data panel dibandingkan dengan menggunakan data time series dan data cross section (Gujarati dan Porter, 2012:237). Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dengan menggunakan data panel dapat mengatasi adanya heterogenitas data dengan memberikan variabel spesifik subjek
2. Data panel dapat memberikan informasi, variasi dan *degree of freedom* lebih banyak kepada peneliti. selain itu data panel juga memberikan lebih sedikit kolinieritas antar variabel. Sehingga data panel dapat menjadi lebih efisien.
3. Data panel merupakan data yang paling tepat untuk digunakan sebagai analisis dinamika perubahan.
4. Data panel merupakan jenis data yang paling tepat untuk digunakan sebagai analisis pengaruh yang tidak dapat dilihat pada data *cross section* dan *time series*.
5. Data panel dapat meminimalisir adanya bias data dengan cara menambah jumlah observasi menjadi berjumlah beberapa ribu unit.

Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y	= ketimpangan ekonomi antar provinsi
X ₁	= kredit investasi
X ₂	= ekspor non migas
X ₃	= produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
X ₄	= produktivitas tenaga kerja sektor industri
α	= konstanta
β ₁ – β ₄	= koefisien

- i = provinsi di Pulau Jawa-Bali
 t = waktu (2005-2013)
 ε = residual atau *error term*

3.6.1 Estimasi Data Panel

Terdapat tiga jenis teknik estimasi yang digunakan untuk data panel yaitu Common Effect Method (CEM), Fixed Effect Method (FEM) dan Random Effect Method (REM).

3.6.1.1 Common Effect Method (CEM)

Common Effect Method (CEM) atau Ordinary Least Square (OLS) Pooled merupakan model data panel yang paling sederhana. Dalam model ini tidak dibedakan antar subjek (daerah, individu, perusahaan) maupun antar waktu. Dengan kata lain hal tersebut menutupi heterogenitas antar subjek. Contoh model persamaan Common Effect Method (CEM) adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + u_{it}$$

Pada saat menggunakan model ini terdapat resiko yang kemungkinan ditanggung oleh peneliti, yaitu korelasi antara error dengan variabel penjelas (*independent*) dalam model. Hal ini akan berakibat pada tidak konsisten atau bias estimasi pada koefisien dalam persamaan.

3.6.1.2 Fixed Effect Method (FEM)

Model (regresi) Fixed Effect Method (FEM) mempunyai ciri yaitu memiliki intersep yang berbeda untuk setiap subjek (daerah, individu, perusahaan) tetapi intersep tersebut tidak berubah seiring waktu atau disebut dengan *time invariant* (Gujarati dan Porter, 2012:242). Jika terdapat intersep yang berbentuk β_{1it} , hal ini menandakan bahwa intersep berbeda untuk setiap subjek dan berubah seiring waktu. Contoh model persamaan fixed effect method (FEM) adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + u_{it}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, dst$$

$$t = 1, 2, 3, \dots, dst$$

Persamaan di atas termasuk dalam intersep yang tidak memiliki perbedaan baik antar subjek maupun antar waktu. Untuk merubah bentuk persamaan menjadi bentuk fixed effect maka langkahnya adalah dengan teknik variabel dummy. Dalam menggunakan variabel dummy harus memperhitungkan jumlah subjek yang digunakan. Misalnya jumlah subjek yang digunakan adalah sebanyak 6 maka jumlah variabel dummy adalah sebanyak 5. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kolinieritas sempurna.

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + u_{it}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, 6$$

$$t = 1, 2, 3, \dots, 15$$

Setelah ditambahkan variabel dummy, persamaannya akan menjadi sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + u_{it}$$

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menggunakan variabel dummy adalah untuk menghindari adanya masalah degree of freedom maka jangan terlalu banyak dalam menggunakan variabel dummy tersebut karena akan menyebabkan berkurangnya jumlah observasi. Kemudian apabila terlalu banyak menggunakan variabel dummy akan menyebabkan terjadinya kemungkinan masalah multikolinieritas.

3.6.1.3 Random Effect Method (REM)

Metode random effect (*Random Effect Method* - REM) disebut juga dengan model komponen eror (*Error Components Model* – ECM) (Gujarati dan Porter, 2012:250). Dalam model ini intersep (β_i) yang digunakan diasumsikan sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata β_0 . Sehingga intersep β_i dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut.

$$\beta_{1i} = \beta_0 + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots (1)$$

di mana, ε_i adalah eror acak dengan nilai rata-rata nol dan varians δ_ε^2 .

Dapat diambil contoh dari persamaan regresi sederhana sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + u_{it} \quad \dots\dots\dots (2)$$

Kemudian mensubstitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2 akan diperoleh

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + \varepsilon_i + u_{it} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 X_{1it} + \beta_3 X_{2it} + \beta_4 X_{3it} + w_{it} \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dari persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan alasan dasar penamaan model error component (ECM) yaitu karena memiliki error term yang terdiri dari dua komponen yaitu ε_i dan u_{it} . ε_i merupakan error term untuk cross section sedangkan u_{it} adalah error term untuk time series dan cross section.

3.6.1.4 Uji Chow

Uji Chow adalah sebuah metode pengujian untuk menentukan model data panel yang tepat apakah menggunakan Common Effect Method (CEM) atau Fixed Effect Method (FEM).

Dasar penentuannya adalah sebagai berikut.

Ho : Common Effect Method (CEM)

Ha : Fixed Effect Method (FEM)

Apabila nilai dari Chow statistik lebih besar dari F-tabel maka Ho ditolak atau tidak dapat menolak Ha. Sehingga dalam persamaan regresi menggunakan



Fixed Effect Method (FEM). Sedangkan apabila nilai dari Chow statistik lebih kecil dari F-tabel maka H_a ditolak atau tidak dapat menolak H_o . Sehingga dalam persamaan regresi menggunakan model Common Effect Method (CEM).

Nilai dari *Chow* statistik dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$C_{how} = \frac{RSS1 - RSS2/(N - 1)}{RSS2/(NT - N - K)}$$

RSS1 = *residual sume of square* hasil pendugaan common effect

RSS2 = *residual sume of square* hasil pendugaan fixed effect

N = jumlah data *cross section*

T = jumlah data *time series*

K = jumlah variabel bebas

3.6.1.5 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang tepat dalam regresi apakah menggunakan Fixed Effect Method (FEM) atau Random Effect Method (REM). Dasar penentuannya adalah sebagai berikut.

H_o : Random Effect Method (REM)

H_a : Fixed Effect Method (FEM)

Kesimpulan yang dapat diambil apabila H_o ditolak adalah terdapat hubungan antara Random Effect Method (REM) dengan satu atau beberapa variabel independent yang diteliti dalam model sehingga penggunaan Random Effect Method (REM) menjadi tidak tepat dan lebih tepat menggunakan Fixed Effect Method (FEM).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menurut Gujarati dan Porter (2012:81), memiliki tujuan untuk memastikan bahwa dalam persamaan regresi terbebas dari adanya bias

spesifikasi atau kesalahan spesifikasi (*specification bias atau specification error*) dalam model pada suatu analisis empiris. Dalam analisis jalur (*path analysis*) terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi sebagai prasyarat penggunaan alat analisis tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menguji apakah data yang digunakan menggunakan model linier atau tidak maka dapat menggunakan uji F atau membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : model tidak linier

H_a : model linier

Jika nilai $F_{statistic} > F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan tidak dapat menolak H_0 , sehingga model yang digunakan dalam penelitian bukan model linier. Jika nilai $F_{statistic} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan tidak dapat menolak H_a , sehingga model yang digunakan dalam penelitian adalah model linier

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah tahap pengujian untuk menguji tingkat normalitas pendistribusian data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang digunakan dalam analisis regresi tidak menghasilkan kesimpulan yang bias. Pengujian data tersebut menggunakan metode Chi Kuadrat (X^2) yaitu dengan membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan nilai Chi Kuadrat (X^2) tabel. Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : $p = 0$, residual terdistribusi normal

H_a : $p \neq 0$, residual tidak terdistribusi normal

Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka H_0 ditolak dan tidak dapat menolak H_a sehingga kesimpulannya adalah residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka H_a ditolak dan tidak dapat menolak H_0 sehingga kesimpulannya residualnya berdistribusi normal.

3.7.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh atau korelasi yang sempurna antar variabel bebas dalam penelitian. Apabila dalam suatu model ditemukan adanya permasalahan multikolinieritas akan menyebabkan terjadinya bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi (*specification bias* atau *specification error*). Selain itu, permasalahan multikolinieritas juga menimbulkan kesalahan penafsiran variabel apa yang benar-benar berpengaruh terhadap variabel terikat. Suatu model dikatakan baik apabila terbebas dari masalah multikolinieritas.

Metode pengujiannya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai dari $VIF > 10$ maka dalam model ditemukan adanya permasalahan multikolinieritas. Sedangkan jika nilai dari $VIF < 10$ maka dalam model tidak ditemukan permasalahan multikolinieritas.

3.7.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terjadi hubungan atau korelasi antara residual dari serangkaian data yang digunakan dalam penelitian. Baik data penelitian yang diuraikan dalam bentuk runtut waktu (*time series*) maupun data silang (*cross section*).

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$, tidak terdapat autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$, terdapat autokorelasi

Tabel 3.5 Kriteria Pengujian Autokorelasi

Null Hipotesis	Hasil Estimasi	Kesimpulan
H_0	$0 < dw < dl$	Tolak
H_0	$dl \leq dw \leq du$	Tidak ada Kesimpulan
H_1	$4 - dl < dw < 4$	Tolak
H_1	$4 - du \leq dw \leq 4 - dl$	Tidak ada kesimpulan
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	$du < dw < 4 - du$	Diterima

Sumber : Dasar-Dasar Ekonometrika Gujarati and Potter, 2012

Apabila nilai durbin watson (dw) kurang dari *lowet bound* (dl) dan lebih dari 0 (nol) maka menolak H_0 dan tidak dapat menolak H_a sehingga terdapat permasalahan autokorelasi dalam model; seperti halnya apabila nilai durbin watson (dw) lebih besar dari $4 - dl$ dan kurang dari 4 maka menolak H_0 dan tidak dapat menolak H_a sehingga terdapat permasalahan autokorelasi dalam model; sedangkan apabila nilai durbin watson (dw) lebih dari *upper bound* (du) dan kurang dari $4 - du$ maka menolak H_a dan tidak dapat menolak H_0 sehingga tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam model. Namun, apabila nilai durbin watson (dw) lebih dari sama dengan dl dan kurang dari sama dengan du maka tidak terdapat kesimpulan dalam model; dan apabila nilai durbin watson (dw) lebih dari sama dengan $4 - du$ dan kurang dari sama dengan $4 - dl$ maka tidak terdapat kesimpulan dalam model.

3.7.5 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sritua (1993) dalam Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro (2011), heteroskedastisitas sering terjadi pada data *cross section*, karena data tersebut menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Metode pengujian yang digunakan adalah metode White's Heterocedastocity

test. Selain itu uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila terjadi kesamaan varians antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya maka yang terjadi adalah hal sebaliknya yaitu homoskedastisitas.

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut,

1. $H_0 : \rho = 0$, dalam model regresi yang diteliti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
2. $H_a : \rho \neq 0$, dalam model regresi yang diteliti terjadi masalah heteroskedastisitas

Setelah dilakukan proses pengujian, apabila nilai dari Prob Chi-Square (X^2) $< \alpha$ (5%) maka tidak dapat menolak H_a atau menolak H_0 sehingga dalam model mengandung permasalahan heteroskedastisitas. Namun apabila nilai dari Prob Chi-Square (X^2) $> \alpha$ (5%) maka dapat menolak H_a atau tidak dapat menolak H_0 sehingga dalam model tidak mengandung permasalahan heteroskedastisitas.

3.8 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi atau uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat yang diteliti dalam model. Nilai dari koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Semakin besar koefisien determinasi yang dihasilkan dari analisis regresi maka semakin besar pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat dalam model. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi maka akan semakin kecil kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat yang diteliti dalam model. Pada umumnya jenis data runtut waktu (*time series*) menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi.

Sedangkan untuk jenis data silang (*cross section*) menghasilkan koefisien determinasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pada jenis data silang (*cross section*) terdapat variasi yang besar pada masing-masing pengamatan.

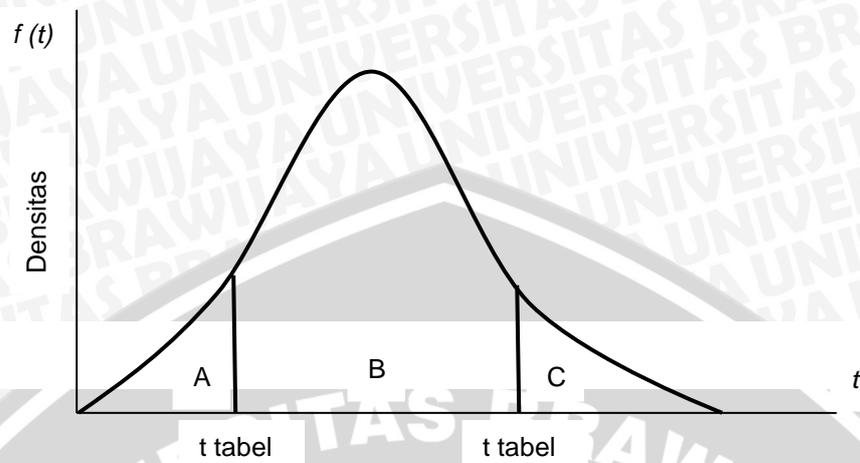
3.9 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah langkah akhir yang dilakukan pada proses analisa data. Tujuan dari dilakukannya uji hipotesis ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*) secara jelas dan dapat dipercaya. Dalam statistika terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol (*null hypothesis*) dan hipotesis alternatif (*alternatitve hypothesis*). Hipotesis nol yaitu jenis hipotesis yang menyatakan ketiadaan korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu jenis hipotesis yang menyatakan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Pada dasarnya terdapat dua jenis pendekatan untuk melakukan uji hipotesis, yaitu melalui pendekatan interval kepercayaan dan melalui pendekatan uji signifikansi. Namun, pada penelitian kali ini akan digunakan uji signifikansi untuk melakukan uji hipotesis. Menurut Gujarati dan Porter (20012:149), uji signifikansi adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol.

Uji signifikansi sendiri juga dibagi ke dalam dua jenis pengujian, yaitu Uji t dan Uji F. Uji t termasuk dalam jenis uji signifikansi secara parsial yaitu menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam uji signifikansi sebuah statistik dikatakan signifikan apabila hasil uji statistiknya berada dalam daerah kritis.

Gambar 3.6 Interval Kepercayaan Uji t Signifikansi



Sumber : Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter (2012)

Keterangan :

A dan C : daerah kritis

B : daerah penerimaan

Dengan kata lain, sebuah statistik dikatakan tidak signifikan apabila hasil uji statistiknya berada dalam daerah penerimaan. Sementara itu nilai t hitung dapat diketahui melalui metode penghitungan sebagai berikut,

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Di mana :

r = nilai korelasi

n = jumlah data

Misalnya terdapat pernyataan hipotesis, yaitu

1. $H_0 : \rho = 0$, tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat
2. $H_a : \rho \neq 0$, terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa t hitung berada di daerah kritis atau dengan kata lain menolak H_0 . Sehingga interpretasinya adalah terdapat korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jika uji t digunakan untuk uji signifikansi secara parsial, maka Uji F merupakan sebuah metode pengujian tingkat signifikansi secara serempak atau bersama – sama. Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh dari keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel terikatnya. Metode pengujiannya hampir sama dengan uji t yaitu tetap berlandaskan pada perbandingan antara statistika hitung dengan statistika tabel. Perbedaannya hanya terletak pada proses perolehan dari F_{hitung} itu sendiri.

$$F_{hitung} = \frac{\frac{SSR}{K}}{\frac{SSE}{n-(k+1)}}$$

Keterangan :

SSR = *sum square regrestion*

SSE = *sum square error*

k = banyaknya variabel penjelas

$k + 1$ = banyaknya parameter regresi yang akan ditaksir

Jadi misalnya terdapat pernyataan hipotesis, yaitu

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, variabel x adalah bukan penjelas yang baik bagi y
2. $H_a : \beta_1 \neq 0$, variabel x adalah penjelas yang baik bagi y

Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa F hitung berada di daerah kritis atau dengan kata lain menolak H_0 . Sehingga interpretasinya adalah variabel x secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel y .

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pulau Jawa-Bali adalah wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. Hal ini berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang secara administrasi terdiri dari 7 provinsi yang meliputi 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 1 provinsi di Pulau Bali yaitu Provinsi Bali. Sementara itu, dengan adanya Perpres Nomor 28 Tahun 2012 ini tujuannya adalah terjadi sinkronisasi program pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa-Bali.

Pulau Jawa-Bali secara geografis di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah selatan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda dan sebelah timur dengan Selat Lombok.

Gambar 4.1 Peta Pulau Jawa – Bali



Sumber : Sistem Informasi Tata Ruang Nasional, 2016

Berikut ini merupakan rincian provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali secara astronomis, administratif dan secara geografis :

1. Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah provinsi yang tergolong baru jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali. Provinsi ini resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia sejak tahun 2000 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara astronomis Provinsi Banten terletak pada $8^{\circ}3'40''$ - $8^{\circ}50'48''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $115^{\circ}42'40''$ BT. Luas wilayahnya adalah 9.662,92 km² dan secara administratif terbagi ke dalam 4 kabupaten dan 4 kota. Secara geografis batas wilayah Provinsi Banten adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.

2. Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang secara astronomis terletak di $5^{\circ} 19' 12''$ - $6^{\circ} 23' 54''$ LS dan $106^{\circ} 22' 42''$ - $106^{\circ} 58' 18''$ BT. Luas wilayahnya adalah 664,01 km² dan secara administratif terbagi ke dalam 5 kota dan 1 kabupaten. Secara geografis Provinsi DKI Jakarta sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

3. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara astronomis terletak di $5^{\circ}50'$ - $7^{\circ}50'$ LS dan $104^{\circ}48'$ - $108^{\circ}48'$ BT. Luas wilayahnya adalah 35.377,76 km² dan secara administratif terbagi ke dalam 17 kabupaten dan 9 kota. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan

dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

4. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah secara astronomis terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ LS dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ BT. Luas wilayahnya adalah $32.800,69 \text{ km}^2$ dan secara administratif terbagi ke dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan 2 provinsi besar, yaitu sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah timur dengan provinsi Jawa Timur. Secara geografis sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

5. Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta secara astronomis terletak di $70^{\circ} 33'$ LS - $8^{\circ} 12'$ LS dan $110^{\circ} 00'$ BT - $110^{\circ} 50'$ BT. Luas wilayahnya adalah $3.133,15 \text{ km}^2$ dan secara administratif terbagi ke dalam 4 kabupaten dan 1 kota. Provinsi DI Yogyakarta secara geografis di sebelah utara, timur, barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

6. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak di $111^{\circ}0'$ BT - $114^{\circ} 4'$ BT dan $7^{\circ} 12'$ LS - $8^{\circ} 48'$ LS. Luas wilayahnya adalah $47.799,75 \text{ km}^2$ dan secara administratif terbagi ke dalam 38 kabupaten/kota. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

7. Provinsi Bali

Provinsi Bali secara astronomis terletak di $8^{\circ}3'40''$ - $8^{\circ}50'48''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $115^{\circ}42'40''$ BT. Luas wilayahnya adalah $5.780,06 \text{ km}^2$ dan secara

administratif terbagi ke dalam 8 kabupaten dan 1 kota. Secara geografis Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok.

4.1.2 Kondisi Perekonomian Pulau Jawa-Bali

Pulau Jawa-Bali merupakan wilayah pemberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian Pulau Jawa-Bali lebih didominasi oleh sektor sekunder dan tersier dengan berorientasi pada industri pengolahan atau manufaktur yang pertumbuhan ekonominya relatif lebih cepat. Meskipun demikian, tidak terlepas dari peranan sektor pertanian yang juga sebagai sektor penopang perekonomian di Pulau Jawa-Bali.

Tabel 4.1 **Struktur Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa-Bali Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013**

No.	Sektor	Nilai (%)
1.	Pertanian	10,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,21
3.	Industri Pengolahan	26,62
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,64
5.	Bangunan	6,67
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,53
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8,16
8.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	10,79
9.	Jasa-Jasa	10,21

Sumber : Badan Pembangunan Nasional, data diolah

Tabel di atas dapat membuktikan bahwa sektor yang memiliki *share* terbesar di Pulau Jawa-Bali adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 24,53 persen kemudian disusul oleh Industri Pengolahan yaitu sebesar 26,62 persen. Sementara itu sektor pertanian menempati urutan ke tiga sebagai sektor dengan *share* terbesar yaitu sebesar 10,18 persen.

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat diukur melalui pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita dapat diperoleh

melalui hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Sementara itu PDRB perkapita mencerminkan besarnya rata-rata nilai tambah bruto penduduk dalam satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu daerah maka penduduk di daerah tersebut dapat dikategorikan sejahtera.

Jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita wilayah yang memiliki nilai pendapatan perkapita di atas rata-rata pendapatan perkapita Pulau Jawa-Bali adalah Provinsi DKI Jakarta, sementara ke enam provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita Pulau Jawa-Bali.

Tabel 4.2 **PDRB Per Kapita Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Ribu Rupiah)**

No.	Provinsi	Nilai		
		2011	2012	2013
1.	DKI Jakarta	43.397	45.703	47.970
2.	Jawa Barat	7.829	8.180	8.565
3.	Jawa Tengah	6.114	6.494	6.773
4.	DI Yogyakarta	6.346	6.632	6.913
5.	Jawa Timur	9.738	10.393	10.951
6.	Banten	8.623	8.928	9.353
7.	Bali	7.745	8.107	8.545
Rata-Rata		12.827	13.491	14.153

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2014

DKI Jakarta menjadi daerah dengan PDRB perkapita di atas rata-rata pendapatan perkapita provinsi karena struktur perekonomian provinsi tersebut mayoritas didorong oleh *non tradeable sector* yang meskipun tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah tetapi mampu mendorong perkembangan sektor lain (*multiplier effect*). Sektor pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta adalah sektor Keuangan, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Industri Pengolahan. Sementara itu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali juga didominasi oleh sektor *non tradeable sector* (Perdagangan, Hotel, Restoran dan Industri Pengolahan) dan kontribusi *tradeable sector* (sektor pertanian) juga tidak kalah besar dalam daerah tersebut.

Selain struktur ekonomi, akan dijelaskan struktur pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali melalui metode Typologi Klassen. Dari Typologi Klassen ini suatu daerah dapat dikelompokkan ke dalam 4 penggolongan daerah, yaitu daerah maju, daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang dan daerah relatif terbelakang. Wilayah Jawa-Bali merupakan suatu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan merupakan sentral pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terbukti dari *share* PDRB wilayah Jawa-Bali yang menduduki peringkat tertinggi di antara pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Sebagai dasar penyusunan tipologi kelas maka digunakan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali dalam kurun waktu 2005-2013. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Provinsi Di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013

No.	Provinsi	Rata-Rata	
		Laju Pertumbuhan PDRB	Pendapatan Perkapita
1.	DKI Jakarta	6,24	39.956
2.	Jawa Barat	5,98	7.295
3.	Jawa Tengah	5,76	5.546
4.	DI Yogyakarta	4,86	5.884
5.	Jawa Timur	6,37	8.805
6.	Banten	5,86	7.894
7.	Bali	6,03	7.247
Rata-Rata Pulau Jawa-Bali		5,13	11.804

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

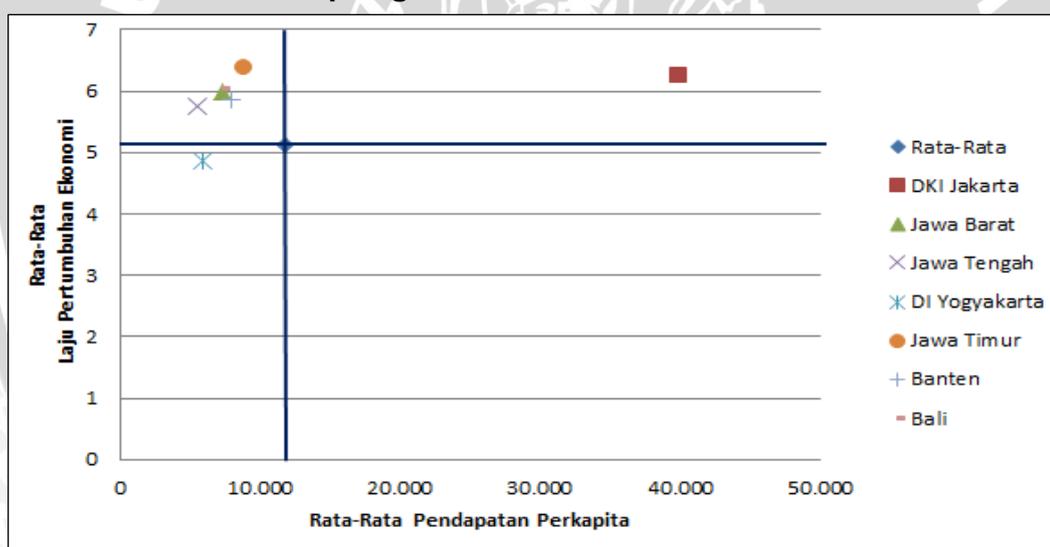
Penggolongan daerah berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi yang penyusunannya didasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dalam kurun waktu 2005-2013 dapat terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dibandingkan dengan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Nasional	Tingkat Pendapatan Daerah Dibandingkan dengan Tingkat Pendapatan Nasional	
	Pendapatan Perkapita di Bawah Rata-Rata	Pendapatan Perkapita di Atas Rata-Rata
Laju Pertumbuhan di Atas Rata-rata	Tipe II Daerah Maju tetapi Tertekan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Bali	Tipe I Daerah Maju DKI Jakarta
Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata	Tipe III Daerah Relatif Terbelakang DI Yogyakarta	Tipe IV Daerah Berkembang -

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Gambar 4.2 Kuadran Tipologi Klassen Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013



Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Dari hasil pengelompokan wilayah berdasarkan struktur pertumbuhannya yaitu menggunakan typologi klassen, hasilnya adalah provinsi-provinsi di wilayah Jawa-Bali pada periode tahun 2005-2013 termasuk ke dalam tipe I, II dan III. Daerah yang termasuk dalam tipe I atau daerah yang tergolong maju adalah DKI Jakarta. Daerah yang termasuk dalam tipe II atau daerah maju tetapi tertekan

adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Jawa Tengah. Sedangkan daerah yang termasuk dalam tipe III atau daerah relatif terbelakang adalah DI Yogyakarta.

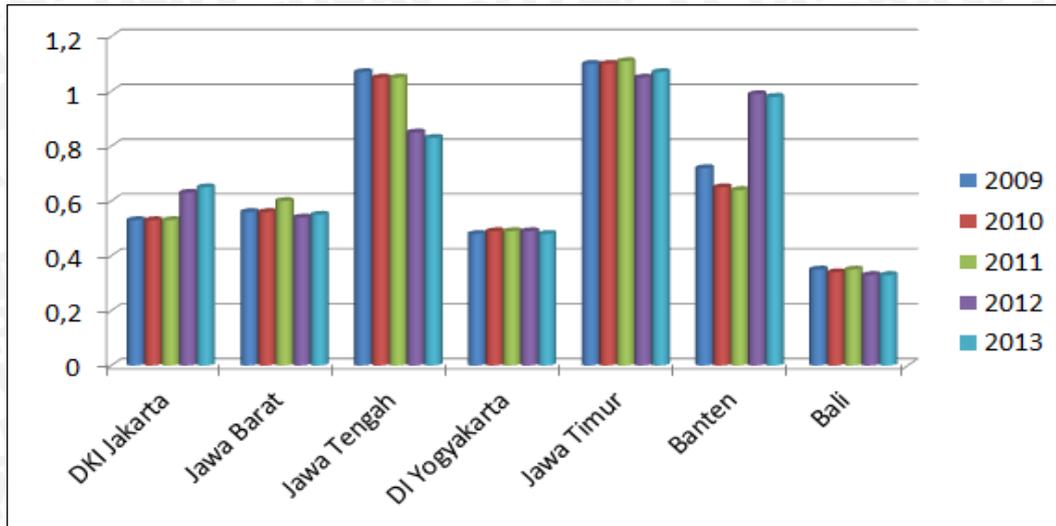
DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam daerah maju karena memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita yang berada di atas rata-rata daerah. Sementara itu Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Jawa Tengah dikategorikan ke dalam daerah maju tetapi terbelakang karena memiliki pendapatan perkapita di atas rata-rata daerah namun laju pertumbuhan PDRB berada di bawah rata-rata daerah. Sedangkan DI Yogyakarta termasuk dalam daerah yang relatif terbelakang dikarenakan memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita yang berada di bawah rata-rata daerah.

4.1.3 Gambaran Umum Variabel

4.1.3.1 Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Selama periode penelitian yaitu pada tahun 2005-2013 ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali tergolong sedang hingga tinggi. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan menggunakan indeks williamson yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Indeks williamson pada dasarnya merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antar wilayah dengan menggunakan pendekatan PDRB perkapita. Semakin besar nilai indeks williamson menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah yang semakin besar pula.

Gambar 4.3 Indeks Williamson menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2009-2013



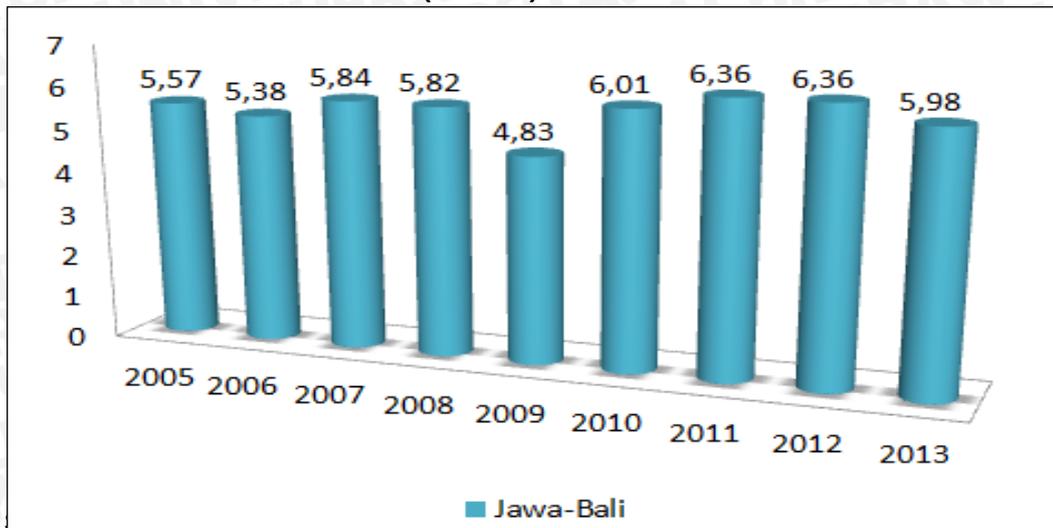
Sumber: Badan Pembangunan Nasional, data diolah

Dari grafik di atas nilai indeks williamson provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali dari tahun 2009 hingga 2013 mayoritas tergolong sedang hingga tinggi. Provinsi tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Sementara itu hanya terdapat satu daerah yang tergolong rendah yaitu Provinsi Bali.

4.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali secara keseluruhan dari tahun ke tahun tergolong tinggi yaitu berkisar antara 4-6,5 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa wilayah tersebut merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Gambar 4.4 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Persen)



Berdasarkan gambar di atas selama periode penelitian yaitu pada tahun 2005–2013 pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa-Bali relatif mengalami peningkatan. Meskipun di tahun-tahun tertentu sempat mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006, 2009, 2013. Pada tahun 2009 adalah pertumbuhan ekonomi terendah yang dialami oleh Wilayah Jawa-Bali dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian global yang sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya krisis ekonomi Amerika Serikat yang kemudian berdampak pada negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

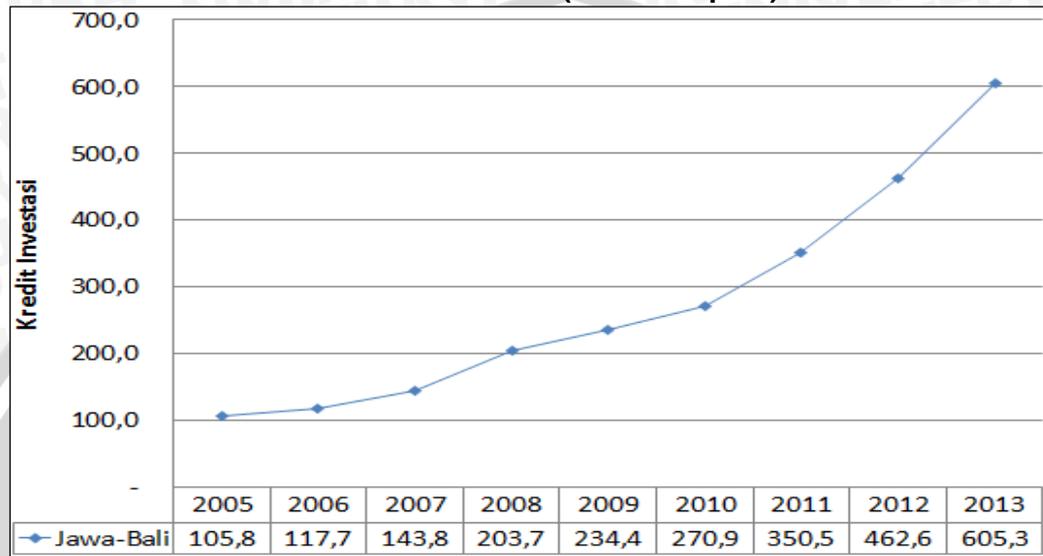
Besarnya pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jawa-Bali dari tahun ke tahun secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut. 5,57 persen (2005), 5,38 persen (2006), 5,84 persen (2007), 5,82 persen (2008), 4,83 persen (2009), 6,01 persen (2010), 6,36 persen (2011), 6,36 persen (2012), dan 5,98 persen (2013).

4.1.3.3 Kredit Investasi

Pada penelitian ini jenis investasi yang digunakan adalah kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum kepada setiap daerah untuk tujuan investasi.

Besar kecilnya alokasi dana yang ditujukan untuk kredit tersebut pada dasarnya tergantung dari seberapa besar tabungan yang dihimpun oleh bank dari masyarakat.

Gambar 4.5 Kredit Investasi yang disalurkan oleh Bank Umum di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Triliun Rupiah)



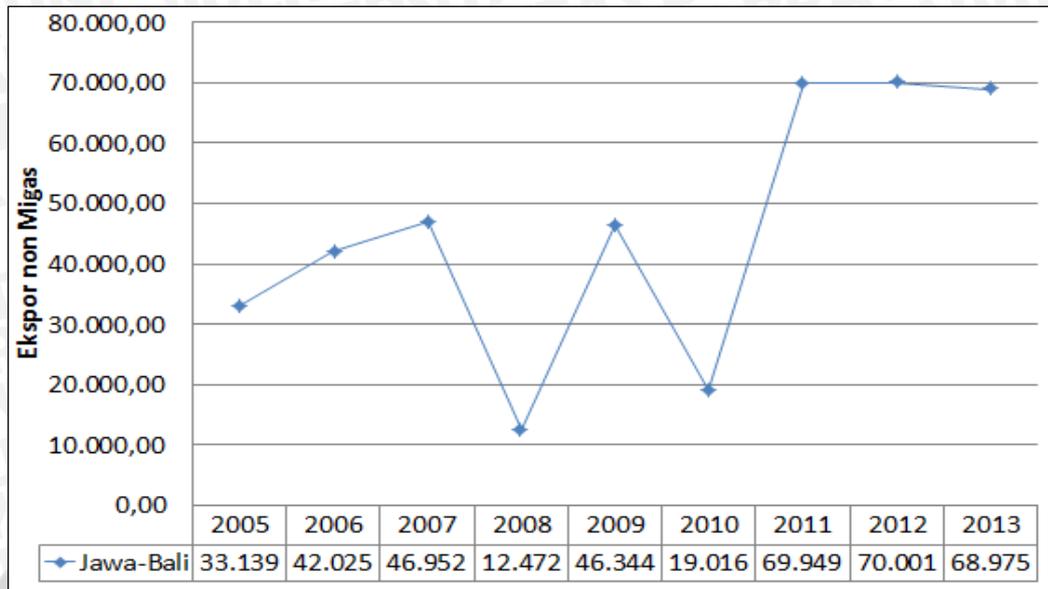
Sumber : Bank Indonesia, data diolah

Besarnya kredit investasi tersebut ke wilayah Jawa-Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 yaitu sebesar 105,8 triliun rupiah, 117,7 triliun rupiah, 143,8 triliun rupiah, 203,7 triliun rupiah, 234,4 triliun rupiah, 270,9 triliun rupiah, 350,5 triliun rupiah, 426,6 triliun rupiah dan pada tahun 2013 adalah 605,3 triliun rupiah.

4.1.3.4 Ekspor Non Migas

Ekspor dalam penelitian ini adalah berupa ekspor non migas yang dijual ke negara lain. Dasar perhitungan dari ekspor ini adalah dengan didasarkan pada syarat F.O.B (*free on board*) yang merupakan kontrak penjualan internasional pada saat nilai barang disepakati berdasarkan tempat oleh pembeli dan penjual sebelumnya.

Gambar 4.6 Ekspor Non Migas Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta US\$)



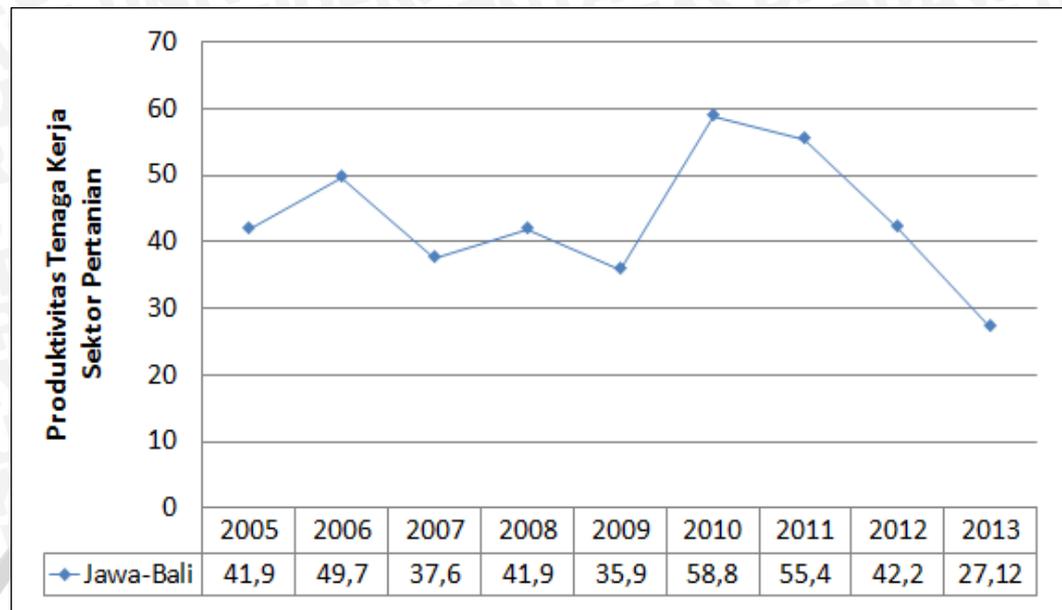
Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014

Berdasarkan grafik di atas nilai ekspor non migas Pulau Jawa-Bali dari tahun ke tahun relatif fluktuatif. Nilai ekspor tertingginya adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 70.001 juta US\$ dan ekspor terendahnya adalah pada tahun 2008. Menurunnya nilai ekspor pada tahun 2008 tersebut sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi global yaitu sebesar 12.472 US\$.

4.1.3.5 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Jawa-Bali relatif mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sektor pertanian termasuk dalam *tradeable sector* atau sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun meskipun demikian, produktivitas tenaga kerjanya tidak terlalu besar dan relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 4.7 Rata-Rata Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Pulau Jawa Bali Tahun 2005-2013 (Juta/Pekerja)



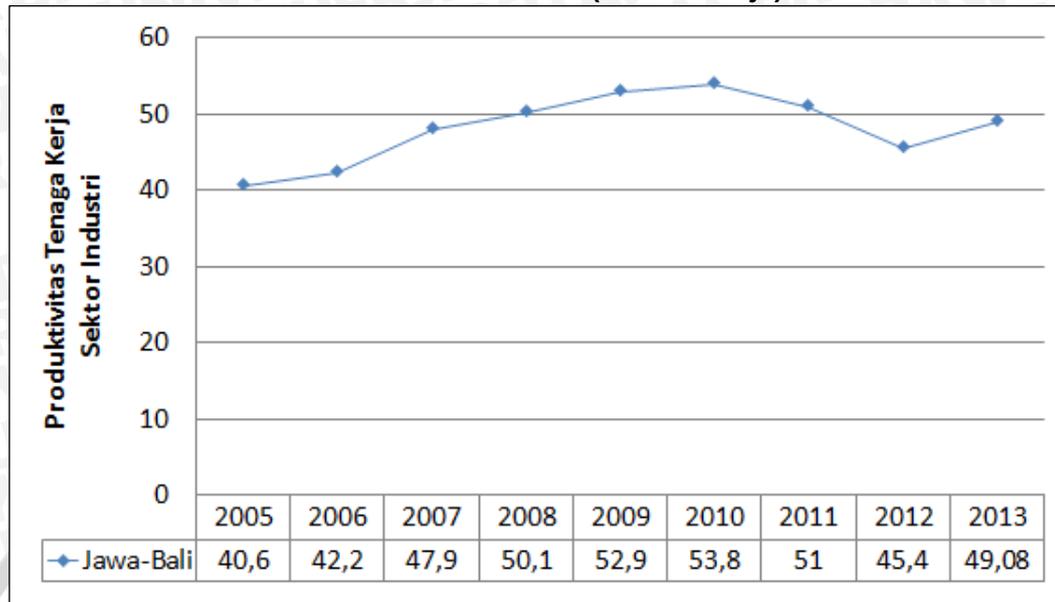
Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Pada periode awal penelitian yaitu pada tahun 2005 dan 2006 produktivitasnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun yang sama namun pergerakannya tidak stabil. Pada tahun 2010 adalah capaian tertingginya yaitu sebesar 58,8 juta/pekerja. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 adalah sebesar 27,12 juta/pekerja.

4.1.3.6 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri

Sektor industri termasuk ke dalam non *tradeable sector* atau sektor yang dapat diperdagangkan. Sektor ini dipandang sebagai sektor yang padat modal, teknologi dan penyerapan tenaga kerjanya rendah. Selain itu sektor tersebut hanya dapat diakses oleh tenaga kerja tertentu saja (pendidikan tinggi) sehingga produktivitas tenaga kerja dalam sektor ini cenderung tinggi.

Gambar 4.8 Rata-Rata Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pulau Jawa-Bali Tahun 2005 – 2013 (Juta/Pekerja)



Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dari tahun ke tahun produktivitas tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2005, produktivitasnya adalah sebesar 40,6 juta/pekerja, 42,2 juta/pekerja, 47,9 juta/pekerja, 50,1 juta/pekerja, 52,9 juta/pekerja, 53,8 juta/pekerja, 51 juta/pekerja, 45,4 juta/pekerja dan pada tahun 2013 adalah sebesar 49,08 juta/pekerja.

4.2 Analisis dan Pembahasan Uji Statistik

Pada analisis ini, akan dijelaskan hasil uji asumsi klasik dan hasil uji statistik mengenai pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Method (FEM). Alasan dipilihnya metode ini adalah dari hasil pengujian menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman memberikan hasil bahwa Fixed Effect Method (FEM) adalah metode yang paling baik dibandingkan metode lainnya seperti Common Effect Method

(CEM) dan Random Effect Method (REM). Setelah mengetahui metode yang tepat kemudian diuji statistika untuk mengetahui hasil uji signifikansi secara parsial (uji t) dan uji secara serempak (uji F).

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dibawah ini merupakan hasil output eviews menggunakan *Ramsey Reset Test*.

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : model linier

Ha : model tidak linier

Jika p -value F-statistic $< \alpha$ maka Ho ditolak atau model tersebut memiliki hubungan yang tidak linier dan apabila p -value F-statistic $> \alpha$ maka Ha ditolak dan tidak dapat menolak Ha sehingga model tersebut memiliki hubungan yang linier.

Tabel 4.5 Hasil Uji Linieritas

Ramsey RESET Test
Equation: EQ01
Specification: Y X1 X2 X3 X4 C
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.767385	57	0.4460
F-statistic	0.588880	(1, 57)	0.4460
Likelihood ratio	0.647528	1	0.4210

Sumber: Eviews 6, data diolah

Berdasarkan hasil output di atas, nilai p -value F-statistic $> \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut memiliki hubungan yang linier.

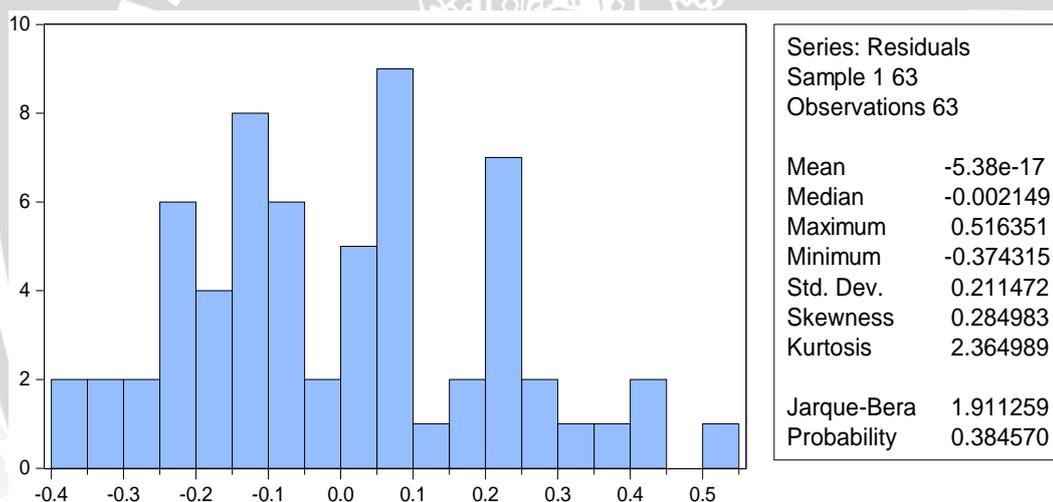
4.2.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji residual data yang diteliti telah terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian residual data yang diteliti ini menggunakan angka yaitu dengan metode Chi Kuadrat (X^2). Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan X^2 tabel.

Ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya tidak berdistribusi normal.
- Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 6, data diolah

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- Ho : data terdistribusi normal
 Ha : data tidak terdistribusi normal

Berdasarkan output histogram residual dari model regresi, nilai Jarque-Bera adalah 1,911259 dan X^2 tabel yaitu 67,505 ($df = n - k - 1 = 63 - 4 - 1 = 58$), maka kesimpulannya adalah menolak Ha dan tidak menolak Ho sehingga data terdistribusi normal atau tidak mengandung data ekstrim.

4.2.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang sempurna antar variabel bebas yaitu cadangan devisa dan pengeluaran pemerintah. Untuk menguji multikolinieritas digunakan uji correlation matrix (r), apabila nilai $r > 0,8$ maka terdapat multikolinieritas dan apabila nilai $r < 0,8$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.000000	0.344368	0.568307	-0.382780	0.343647
X1	0.344368	1.000000	0.659131	-0.181317	0.654812
X2	0.568307	0.659131	1.000000	-0.254240	0.567533
X3	-0.382780	-0.181317	-0.254240	1.000000	-0.287561
X4	0.343647	0.654812	0.567533	-0.287561	1.000000

Sumber: Eviews 6, data diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinieritas karena hasil uji correlation matrix (r) seluruhnya berada di atas 0,8.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terjadi hubungan atau korelasi antara residual dari serangkaian data yang digunakan dalam penelitian. Baik data penelitian yang diuraikan dalam bentuk runtut waktu (*time series*) maupun data silang (*cross section*).

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : $\rho = 0$, tidak terdapat autokorelasi

Ha : $\rho \neq 0$, terdapat autokorelasi

Jika p -value obs*R-square $< \alpha$ maka H_0 ditolak atau dalam model mengandung masalah autokorelasi dan apabila p -value obs*R-square $> \alpha$ maka H_a ditolak dan tidak dapat menolak H_a sehingga dalam model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.874015	Prob. F(22,36)	0.0459
Obs*R-squared	33.63254	Prob. Chi-Square(22)	0.0535

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/08/16 Time: 04:27

Sample: 1 63

Included observations: 63

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.020717	0.029699	0.697572	0.4899
X2	0.005638	0.014444	0.390347	0.6986
X3	0.014307	0.049259	0.290433	0.7732
X4	-0.004075	0.058768	-0.069346	0.9451
C	-0.329137	0.319443	-1.030346	0.3097
R-squared	0.533850	Mean dependent var		-8.70E-18
Adjusted R-squared	0.197186	S.D. dependent var		0.211472
S.E. of regression	0.189479	Akaike info criterion		-0.191550
Sum squared resid	1.292482	Schwarz criterion		0.726936
Log likelihood	33.03384	Hannan-Quinn criter.		0.169695
F-statistic	1.585705	Durbin-Watson stat		1.837768
Prob(F-statistic)	0.099193			

Berdasarkan hasil output di atas, nilai p -value obs*R-square $> \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak mengandung masalah autokorelasi.

4.2.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji suatu model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dan residual antara satu pengamatan

dengan pengamatan yang lain sehingga menyebabkan parameter yang diduga tidak efisien. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan metode ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).

Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : homoskedastisitas

Ha : heteroskedastisitas

Jika p -value obs*R-square $< \alpha$ maka Ho ditolak atau dalam model mengandung masalah heteroskedastisitas dan apabila p -value obs*R-square $> \alpha$ maka Ha ditolak dan tidak dapat menolak Ha sehingga dalam model tidak mengandung masalah heteroskedastitas.

Tabel 4.9 Hasil Uji ARCH Heteroscedasticity Test

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	2.421536	Prob. F(4,54)	0.0594
Obs*R-squared	8.973418	Prob. Chi-Square(4)	0.0618

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/28/16 Time: 13:10

Sample (adjusted): 5 63

Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025807	0.010492	2.459713	0.0171
RESID^2(-1)	0.366617	0.135265	2.710355	0.0090
RESID^2(-2)	0.078637	-0.139227	0.564813	0.5745
RESID^2(-3)	-0.107401	0.137318	-0.782133	0.4376
RESID^2(-4)	0.041687	0.129196	0.322663	0.7482

R-squared	0.152092	Mean dependent var	0.041753
Adjusted R-squared	0.089284	S.D. dependent var	0.050820
S.E. of regression	0.048499	Akaike info criterion	-3.133623
Sum squared resid	0.127015	Schwarz criterion	-2.957560
Log likelihood	97.44187	Hannan-Quinn criter.	-3.064895
F-statistic	2.421536	Durbin-Watson stat	1.868403
Prob(F-statistic)	0.059366		

Sumber: Eviews 6, data diolah

Berdasarkan hasil output di atas, nilai p -value $\text{obs}^*R\text{-square} > \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.2.2 Estimasi Data Panel

4.2.2.1 Uji Chow

Uji Chow adalah model pengujian data panel untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk regresi lebih baik menggunakan Common Effect Method (CEM) atau Fixed Effect Method (FEM). Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : Common Effect Method (CEM)

Ha : Fixed Effect Method (FEM)

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: _FEM				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	125.833380	(6,52)	0.0000	
Cross-section Chi-square	172.751058	6	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: Y?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/24/16 Time: 12:40				
Sample: 2005 2013				
Included observations: 9				
Cross-sections included: 7				
Total pool (balanced) observations: 63				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.329922	0.296255	1.113641	0.2700
X1?	-0.010600	0.026829	-0.395101	0.6942
X2?	0.054052	0.014182	3.811294	0.0003
X3?	-0.108354	0.046032	-2.353895	0.0220
X4?	0.000967	0.058098	0.016641	0.9868
R-squared	0.385695	Mean dependent var	0.683968	
Adjusted R-squared	0.343329	S.D. dependent var	0.269812	
S.E. of regression	0.218643	Akaike info criterion	-0.126716	
Sum squared resid	2.772673	Schwarz criterion	0.043374	
Log likelihood	8.991548	Hannan-Quinn criter.	-0.059819	
F-statistic	9.103892	Durbin-Watson stat	0.359810	
Prob(F-statistic)	0.000009			

Sumber: Eviews 6, data diolah

Berdasarkan hasil Uji Chow di atas nilai Prob Cross-section F adalah 0,000 dengan $\alpha = 5\%$ maka menolak H_0 dan tidak dapat menolak H_a . Sehingga data panel yang digunakan lebih baik menggunakan Fixed Effect Method (FEM) dibandingkan menggunakan Common Effect Method (CEM).

4.2.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman adalah model pengujian data panel untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk regresi lebih baik menggunakan Random Effect Method (FEM) atau Fixed Effect Method (FEM). Namun harus dengan syarat bahwa Fixed Effect Method (FEM) dan Random Effect Method (FEM) lebih efisien daripada Common Effect Method (CEM). Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 : Random Effect Method (FEM)

H_a : Fixed Effect Method (FEM)

Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: _REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.613117	4	0.0086

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.063555	0.062710	0.000003	0.6448
X2?	-0.002383	-0.000056	0.000002	0.0766
X3?	0.045620	0.040685	0.000012	0.1572
X4?	0.057970	0.058400	0.000012	0.9024

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 02/24/16 Time: 12:40
Sample: 2005 2013
Included observations: 9
Cross-sections included: 7
Total pool (balanced) observations: 63



Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.960417	Mean dependent var	0.683968
Adjusted R-squared	0.952804	S.D. dependent var	0.269812
S.E. of regression	0.058615	Akaike info criterion	-2.678320
Sum squared resid	0.178660	Schwarz criterion	-2.304122
Log likelihood	95.36708	Hannan-Quinn criter.	-2.531146
F-statistic	126.1679	Durbin-Watson stat	1.369733
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 6, data diolah

Berdasarkan hasil Uji Hausman di atas nilai Prob Cross-section random adalah 0,000 dengan $\alpha = 5\%$ maka menolak H_0 dan tidak dapat menolak H_a . Sehingga data panel yang digunakan lebih baik menggunakan Fixed Effect Method (FEM) dibandingkan menggunakan Random Effect Method (REM).

4.2.2.3 Hasil Regresi Data Panel

Dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman, memberikan hasil bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam data panel adalah Fixed Effect Method (FEM). Sehingga selanjutnya dalam melakukan uji regresi data panel menggunakan Fixed Effect Method (FEM).

Tabel 4.12 Hasil Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Method (FEM)

Dependent Variable: Y?
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/24/16 Time: 12:40
 Sample: 2005 2013
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 7
 Total pool (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.265261	0.133672	-1.984412	0.0525
X1?	0.063555	0.010235	6.209810	0.0000
X2?	-0.002383	0.006559	-0.363349	0.7178
X3?	0.045620	0.017882	2.551135	0.0137
X4?	0.057970	0.021234	2.730065	0.0086

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			

R-squared	0.960417	Mean dependent var	0.683968
Adjusted R-squared	0.952804	S.D. dependent var	0.269812
S.E. of regression	0.058615	Akaike info criterion	-2.678320
Sum squared resid	0.178660	Schwarz criterion	-2.304122
Log likelihood	95.36708	Hannan-Quinn criter.	-2.531146
F-statistic	126.1679	Durbin-Watson stat	1.369733
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 6, data diolah

Hasil output di atas menunjukkan hasil uji signifikansi antara variabel bebas (*independent variable*) yaitu investasi, ekspor, produktivitas tenaga kerja pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali, baik secara parsial maupun simultan.

4.2.2.4 Uji F

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas, uji signifikansi serempak (uji F) menunjukkan nilai sebesar 0,000000. Nilai p (probabilitas) ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari toleransi error (α) yang sebesar 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel bebas (*independent variable*) yaitu kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri secara signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Hasil analisis regresi data panel diperoleh nilai R^2 sebesar 0.960417. Hal ini berarti bahwa 96,04% variasi variabel terikat (*dependent variable*) yaitu ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel bebas (*independent variable*) yaitu kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri, sedangkan sisanya 3,96% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model.

4.2.2.5 Uji t

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas, uji signifikansi secara parsial (uji t) dengan tingkat toleransi error (α) sebesar 5% menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga variabel bebas (*independent variable*) yaitu kredit investasi, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) lainnya yaitu ekspor non migas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Variabel kredit investasi dalam penelitian ini memiliki koefisien positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan investasi sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.063555%, *ceteris paribus* (dengan menganggap kostan variabel di luar investasi).

Variabel ekspor non migas dalam penelitian ini memiliki koefisien negatif dan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.002383%, *ceteris paribus* (dengan menganggap variabel di luar ekspor adalah tetap).

Variabel produktivitas tenaga kerja sektor pertanian memiliki koefisien positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa-Bali. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.045620%, *ceteris paribus* (dengan

menganggap variabel di luar produktivitas tenaga kerja sektor pertanian adalah konstan).

Variabel produktivitas tenaga kerja sektor industri memiliki koefisien positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja sektor industri sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.057970%, *ceteris paribus* (dengan menganggap variabel di luar produktivitas tenaga kerja sektor industri adalah konstan).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kredit Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali

Kredit investasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Dengan koefisien sebesar 0.063555. Hal ini memberikan kesimpulan yaitu pada saat kredit investasi meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.063555%, *ceteris paribus*.

Menurut teori Keynes yang dikembangkan oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar, diungkapkan beberapa syarat agar perekonomian dapat secara mantap tumbuh dan berkembang (*steady growth*). Salah satu syarat penting diantaranya adalah pembentukan modal. Hal ini dikarenakan pembentukan modal atau investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:83). Daerah yang alokasi investasinya tinggi maka pertumbuhan ekonominya akan tinggi. Sedangkan daerah yang alokasi investasinya rendah maka pertumbuhan ekonominya juga akan rendah. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan timbulnya permasalahan ketimpangan. Menurut

Yustika (2002:97), salah satu faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah terdapat perbedaan alokasi sumberdaya dan faktor produksi yang dimiliki masing – masing daerah. Faktor produksi yang dimaksud adalah seperti tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi.

Dalam penelitian ini, variabel kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum ke setiap provinsi di Pulau Jawa-Bali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Berikut ini adalah besarnya kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum ke setiap sektor dan setiap provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Tabel 4.13 **Posisi Kredit Perbankan Menurut Provinsi dan Sektor Ekonomi Utama di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012**

No.	Provinsi	Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Utama	
		Sektor	Jumlah (Miliar Rupiah)
1.	DKI Jakarta	Sektor Industri Pengolahan	250.180
		Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	179.036
		Sektor Perantara Keuangan	113.446
2.	Jawa Barat	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	41.877
		Sektor Industri Pengolahan	35.988
		Sektor <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.267
3.	Jawa Tengah	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	43.983
		Sektor Industri Pengolahan	29.047
		Sektor <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.875
4.	DI Yogyakarta	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	4.417
		Sektor <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.201
		Sektor Industri Pengolahan	1.150
5.	Jawa Timur	Sektor Industri Pengolahan	67.280
		Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	57.115
		Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.643
6.	Banten	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	7.871
		Sektor Industri Pengolahan	6782
		Sektor <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	6016
7.	Bali	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	11.040
		Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.937
		Sektor Industri Pengolahan	1.427

Sumber : Bank Indonesia, 2012

Berdasarkan tabel di atas, kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum mayoritas di setiap provinsi terserap di *non tradeable sector* yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor *non tradeable* atau sektor yang tidak dapat diperdagangkan adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi karena sektor ini bersifat padat modal. Sehingga provinsi di Pulau Jawa-Bali cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Besarnya aliran dana investasi ke *non tradeable sector* tersebut berbanding lurus dengan sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa-Bali. Hal ini dapat diperjelas dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.14 **Sektor yang Mendominasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012**

No.	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi	Sektor
1.	DKI Jakarta	6,53	Jasa-Jasa
2.	Jawa Barat	6,28	Industri Pengolahan
3.	Jawa Tengah	6,34	Industri Pengolahan
4.	DI Yogyakarta	5,32	Perdagangan, Hotel dan Restoran
5.	Jawa Timur	7,27	Perdagangan, Hotel dan Restoran
6.	Banten	6,15	Industri Pengolahan
7.	Bali	6,65	Sektor Bangunan

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2012

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa-Bali, lima provinsi diantaranya didorong oleh sektor yang termasuk ke dalam tiga besar sektor dengan alokasi kredit investasi terbesar di masing-masing provinsi tersebut. Seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur sektor yang mendominasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini sejalan dengan alokasi kredit investasi di kelima provinsi tersebut yang memang terserap di

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun, jika dilihat pengaruhnya terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Kredit investasi di Provinsi Jawa Timur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7,27 persen, Jawa Tengah 6,34 persen, Jawa Barat 6,28 persen, dan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 5,32 persen. Provinsi DI Yogyakarta yang termasuk ke dalam daerah relatif tertinggal alokasi kredit investasi tersebut pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi adalah terendah diantara provinsi-provinsi lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi yang berupa kredit investasi yang disalurkan oleh Bank Umum ke setiap provinsi di Pulau Jawa-Bali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

4.3.2 Pengaruh Ekspor Non Migas terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali

Variabel ekspor non migas memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Dengan koefisien sebesar 0.002383. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan ekspor non migas sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.002383%, *ceteris paribus*.

Menurut Todaro dan Smith (2006:94), pertumbuhan ekonomi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didorong dengan jalan menerapkan kebijakan internasional yang pro ke luar. Sistem perekonomian terbuka yang bebas dan meminimalkan hambatan perdagangan akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perekonomian tertutup.

Dalam penelitian ini, variabel ekspor memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Rui Hao dan Zheng Wi (2007) yang berjudul “*Fundamental Causes of Inland Coastal Inequality in Post Reform China*” yang mana pada masa sebelum reformasi pengaruh ekspor adalah negatif dan tidak signifikan antara liberalisasi perdagangan yang diukur melalui ekspor dan impor terhadap ketimpangan ekonomi di China. Marie Daumal (2010) dengan penelitiannya yang berjudul “*Impact of Trade Openness on Regional Inequality and Political Unity*” memberikan hasil yaitu keterbukaan ekonomi secara signifikan menurunkan ketidakmerataan di Brazil. Selain itu, juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muradi (2014), yang memberikan hasil ekspor berpengaruh negatif terhadap ketimpangan (diukur melalui gini ratio) di Koridor Ekonomi Pulau Sulawesi.

Ekspor non migas di Pulau Jawa-Bali seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, memiliki pergerakan yang relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Pergerakan ekspor tersebut secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

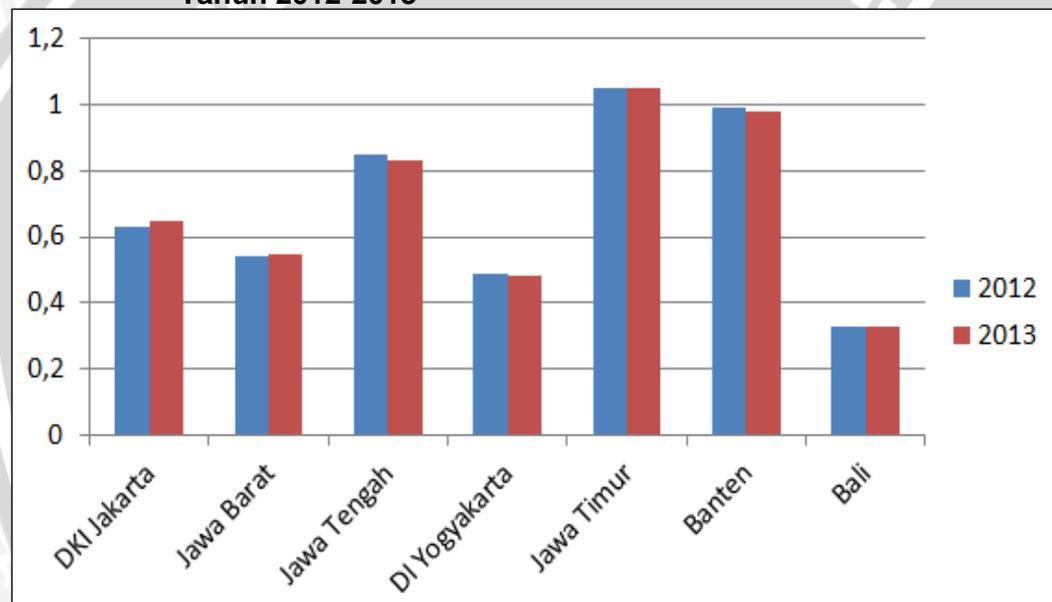
Tabel 4.15 **Nilai Ekspor Masing-Masing Provinsi Di Pulau Jawa-Bali Tahun 2009-2013 (Juta US\$)**

No.	Provinsi	Ekspor				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	DKI Jakarta	31.949,6	39.546	46.376	48.073	47.309
2.	Jawa Barat	346,6	535	695	968	274
3.	Jawa Tengah	2.885,3	3.674	4.260	4.513	4.871
4.	DI Yogyakarta	3,7	12,9	13	13	16
5.	Jawa Timur	10.382	13.805,5	17.424	15.524	15.055
6.	Banten	523,3	577,5	806	563	1.123
7.	Bali	253,6	372,1	375	347	327

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2014

Berdasarkan tabel di atas, daerah yang mendominasi ekspor non migas di Pulau Jawa-Bali adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pergerakan nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan beberapa daerah lainnya, seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Bali mengalami nilai ekspor yang relatif fluktuatif. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta yang tergolong sebagai daerah yang relatif terbelakang secara bertahap mengalami peningkatan nilai ekspor dari tahun ke tahun.

Gambar 4.9 Indeks Williamson Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012-2013



Sumber : Bappenas, 2014

Adanya peningkatan nilai ekspor dari daerah yang relatif terbelakang yaitu Provinsi DI Yogyakarta menyebabkan penurunan ketimpangan meskipun tidak secara signifikan karena penurunan ketimpangan tersebut tidak terlalu besar. Namun, hal ini mengindikasikan suatu kondisi dimana daerah tersebut mulai mengalami perbaikan dengan ditunjukkan melalui nilai ketimpangan yang mengalami penurunan sehingga daerah tersebut dapat semakin mensterikan diri dengan daerah yang lain yang sudah tergolong daerah maju (DKI Jakarta) dan daerah maju tetapi tertekan (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur,

dan Bali). Sehingga berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa ekspor dapat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan dalam provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Secara umum komoditas utama yang menyusun ekspor non migas di Pulau Jawa-Bali adalah sektor industri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, kontribusi sektor industri dalam mendorong ekspor di masing-masing provinsi di Pulau Jawa-Bali cukup besar yaitu lebih dari 50 persen dibandingkan dengan sektor lainnya. Proporsi komoditas sektor industri dalam mendorong ekspor di masing-masing provinsi di Pulau Jawa-Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16 Ekspor Sektor Industri Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (persen)

No.	Provinsi	Ekspor Sektor Industri
1.	DKI Jakarta	67,37
2.	Jawa Barat	92,64
3.	Jawa Tengah	84,15
4.	DI Yogyakarta	81,67
5.	Jawa Timur	90,81
6.	Banten	95,24
7.	Bali	36,64

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Pemaparan di atas berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri yang pada dasarnya merupakan sektor dengan kontribusi terbesar untuk ekspor. Di Pulau Jawa-Bali, jumlah tenaga kerja terbesar yang bekerja di sektor industri hanya terdapat di Provinsi Banten sedangkan di provinsi lainnya terdapat di sektor pertanian dan perdagangan besar dan eceran. Hal ini didukung oleh data sebagai berikut.

Tabel 4.17 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013

No.	Provinsi	Sektor	Jumlah
1.	DKI Jakarta	Perdagangan Besar dan Eceran	1.663.315
2.	Jawa Barat	Perdagangan Besar dan Eceran	4.799.189
3.	Jawa Tengah	Pertanian	4.926.629
4.	DI Yogyakarta	Perdagangan Besar dan Eceran	479.876
5.	Jawa Timur	Pertanian	7.214.218

No.	Provinsi	Sektor	Jumlah
6.	Banten	Industri	775.209
7.	Bali	Perdagangan Besar dan Eceran	628.585

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2014

Jumlah tenaga kerja terbesar yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali. Sektor Industri di Provinsi Banten sedangkan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tingginya kontribusi sektor industri sebagai pendorong ekspor di Pulau Jawa-Bali tidak sejalan dengan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali berbanding lurus dengan tingginya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di beberapa daerah tersebut. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu jenis lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB menurut jenis penggunaan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB itu sendiri dapat dibedakan atas beberapa bentuk yaitu pembentukan modal dalam bentuk bangunan atau konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Tabel 4.18 **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB Provinsi di Pulau Jawa-Bali (persen)**

No.	Provinsi	Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK 2000
1.	DKI Jakarta	36,55
2.	Jawa Barat	17,73
3.	Jawa Tengah	11,13
4.	DI Yogyakarta	25,61
5.	Jawa Timur	18,12
6.	Banten	9,23

No.	Provinsi	Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK 2000
7.	Bali	31,52

Sumber: Badan Pembangunan Nasional, 2014

Provinsi Banten yang merupakan daerah dengan jumlah tenaga kerja terbesar di sektor industri, memiliki distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang paling rendah di antara daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi tersebut pendapatan (termasuk *saving*) yang digunakan untuk tujuan investasi barang modal cenderung rendah. Sedangkan daerah lainnya pendapatan (termasuk *saving*) yang digunakan untuk tujuan investasi barang modal cenderung tinggi. Hal ini pada akhirnya berimbas pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Provinsi Banten tenaga kerja yang bekerja di sektor industri cenderung tinggi sedangkan di lima provinsi lainnya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri cenderung rendah sehingga sumbangan pendapatan masyarakat atau PDRB perkapita cenderung rendah. Seperti yang dinyatakan oleh Jung dan Marshall dalam Aliman dan Purnomo (2001:124), memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa alasan yang muncul terkait hubungan antara ekspor dengan pergerakan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah ekspor dapat mendorong adanya penggunaan secara penuh sumber daya sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki masing-masing daerah dan mendorong adanya pembagian kerja (*economic of scale*) sehingga berdampak pada penghematan produksi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tenaga kerja relatif banyak (*labor intensive*) namun sebagian besar daerah di Pulau Jawa-Bali dalam melakukan produksi sudah bergeser ke penggunaan modal. Menurut teori Neoklasik, salah satu faktor produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah

adalah faktor tenaga kerja. Apabila tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut adalah minoritas maka pengaruh ekspor akan kurang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja di wilayah tersebut. Sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah akan sulit dikurangi.

4.3.3 Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali

Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Dengan koefisien sebesar 0.045620. Hal tersebut berarti apabila terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.045620%, *ceteris paribus*.

Menurut teori Neoklasik Solow, terdapat peran serta dari faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi yang dimaksud adalah penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi (Arsyad, 2010:87-88). Sementara itu, pertumbuhan output selalu bersumber dari tiga hal yaitu, kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan Smith, 2006:150). Menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor pertanian akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga pada akhirnya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi pada sektor tradisional yaitu sektor pertanian akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke atas atau menuju garis pemerataan.

Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Gary Fields dalam Todaro dan Smith di atas. Penyebabnya adalah meskipun sektor pertanian termasuk ke dalam *tradeable sector* yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi namun tenaga kerja di sektor ini belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Hal yang mempengaruhinya adalah terdapat kualitas yang rendah dari tenaga kerja di sektor pertanian. Teori dualisme Lewis memberikan penjelasan bahwa di sektor pertanian produktivitas tenaga kerjanya cenderung rendah (Kuncoro, 2006:58). Hal ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang rendah namun kuantitas tenaga kerjanya relatif banyak. Sehingga terjadi surplus tenaga kerja dengan ditandai oleh nilai produk marginal (*marginal product*) tenaga kerja yang bernilai nol.

Menurut Sukirno (2002), negara berkembang dimana setengah dari penduduknya berada di sektor pertanian memiliki potensi masalah tingkat produktivitas yang rendah termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur pertanian menjadi penyebab rendahnya produktivitas sektor tersebut dan akibatnya adalah masalah kemiskinan yang meluas.

Tabel 4.19 **Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (juta orang)**

No.	Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja
1.	DKI Jakarta	0,007
2.	Jawa Barat	3,5
3.	Jawa Tengah	4,6
4.	DI Yogyakarta	0,42
5.	Jawa Timur	6,8
6.	Banten	0,64

No.	Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja
7.	Bali	0,52

Sumber : Kementerian Pertanian, 2013

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang termasuk *tradeable sector* yaitu sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Provinsi dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,8 juta orang. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu sebesar 4,6 juta orang dan 3,5 juta orang.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ini berbanding terbalik dengan kualitas tenaga kerja yang ada di sektor tersebut. Sebagian besar tenaga kerjanya adalah berpendidikan SD. Namun terdapat beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu SMA ke atas. Hal ini dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 **Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (orang)**

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	Tidak/belum pernah sekolah	610	236.433	479.727	7.197	1.048.409	46.002	92.432
2.	Tidak tamat SD	0	802.717	1.189.269	100.979	1.625.418	208.642	119.076
3.	SD	2.633	2.001.910	1.992.316	152.468	2.756.093	315.519	181.755

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
4.	SMP	962	314.392	631.133	85.871	958.617	53.580	62.605
5.	SMA	1.931	106.456	180.299	34.911	339.704	12.037	41.031
6.	SMK	370	29.163	110.226	37.465	125.612	4.310	19.971
7.	Diploma	945	11.368	14.257	6.652	11.228	307	5.278
8.	S1	0	12.607	12.346	3.513	30.847	1.608	3.956

Sumber : Kementerian Pertanian, 2013

Peningkatan pada penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan penurunan pendapatan. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah meskipun mayoritas tenaga kerjanya berada di tingkat pendidikan SD namun tenaga kerja yang berpendidikan SMA ke atas masih tergolong tinggi sehingga produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedangkan provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten dan Bali tenaga kerja di sektor pertanian mayoritas berpendidikan SD dan tenaga kerja yang berpendidikan SMA ke atas tergolong rendah sehingga produktivitas tenaga kerja sektor

pertanian di daerah tersebut rendah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

4.3.4 Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi Di Pulau Jawa-Bali

Produktivitas tenaga kerja sektor industri memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Dengan koefisien sebesar 0.057970. Hal ini memberikan kesimpulan yaitu pada saat produktivitas tenaga kerja sektor industri meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 0.057970%, *ceteris paribus*.

Menurut teori Lewis, produktivitas tenaga kerja sektor industri adalah cukup tinggi. Hal ini disebabkan produk marginal (*marginal product*) bernilai positif. Sehingga apabila terdapat penambahan tenaga kerja pada sektor tersebut akan meningkatkan output. Implikasinya adalah akan berdampak pada tingginya pendapatan dan tingginya pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh sektor industri. Sementara itu menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor modern yaitu sektor industri akan menghasilkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata atau terjadi kesenjangan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi yang berasal dari sektor industri akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke bawah atau menjauhi garis pemerataan.

Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau

Jawa-Bali. Hal ini berkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan output seperti dalam teori Lewis yang telah disebutkan sebelumnya. Umumnya tenaga kerja yang terserap di sektor industri adalah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Sementara itu, sektor industri umumnya adalah terletak di daerah maju. Akibatnya tenaga kerja produktif di daerah kurang maju akan beralih ke daerah yang lebih maju.

Tabel 4.21 **Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Pulau Jawa-Bali Tahun 2012 – 2013 (juta/pekerja)**

No.	Provinsi	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	
		2012	2013
1.	DKI Jakarta	103,6	117,2
2.	Jawa Barat	47,6	50,1
3.	Jawa Tengah	34,4	36,1
4.	DI Yogyakarta	18,5	18,3
5.	Jawa Timur	48,5	52,9
6.	Banten	44	44,6
7.	Bali	21,2	24,4

Sumber : Badan Pusat Statistika, data diolah

Dari data di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja sektor industri secara berturut-turut yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, produktivitas tertingginya berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 103,6 juta/pekerja dan 117,2 juta/pekerja kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 48,5 juta/pekerja dan 52,9 juta/pekerja dan Provinsi Jawa Barat sebesar 50,1 juta/pekerja. Sementara itu produktivitas tenaga kerja sektor industri terendah adalah di Provinsi DI Yogyakarta yaitu pada tahun 2012 sebesar 18,5 juta/pekerja dan tahun 2013 sebesar 18,3 juta/pekerja.

Tingginya produktivitas tenaga kerja sektor industri tersebut tidak terlepas dari peran serta pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerjanya. Di daerah yang memiliki produktivitas yang tinggi tersebut sebagian besar tenaga kerjanya adalah berpendidikan SMA. Seperti DKI Jakarta tenaga kerja yang berpendidikan

setara SMA adalah sebesar 241.394 orang, Jawa Barat sebesar 1.559.962 orang dan Jawa Timur sebesar 967.055 orang. Provinsi DI Yogyakarta yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif terbelakang meskipun tenaga kerja di sektor industri sebagian besar berada pada tingkat pendidikan SMA namun kuantitasnya terendah di antara provinsi lain yang tergolong daerah maju dan daerah maju tetapi tertekan. Hal ini dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut ini.

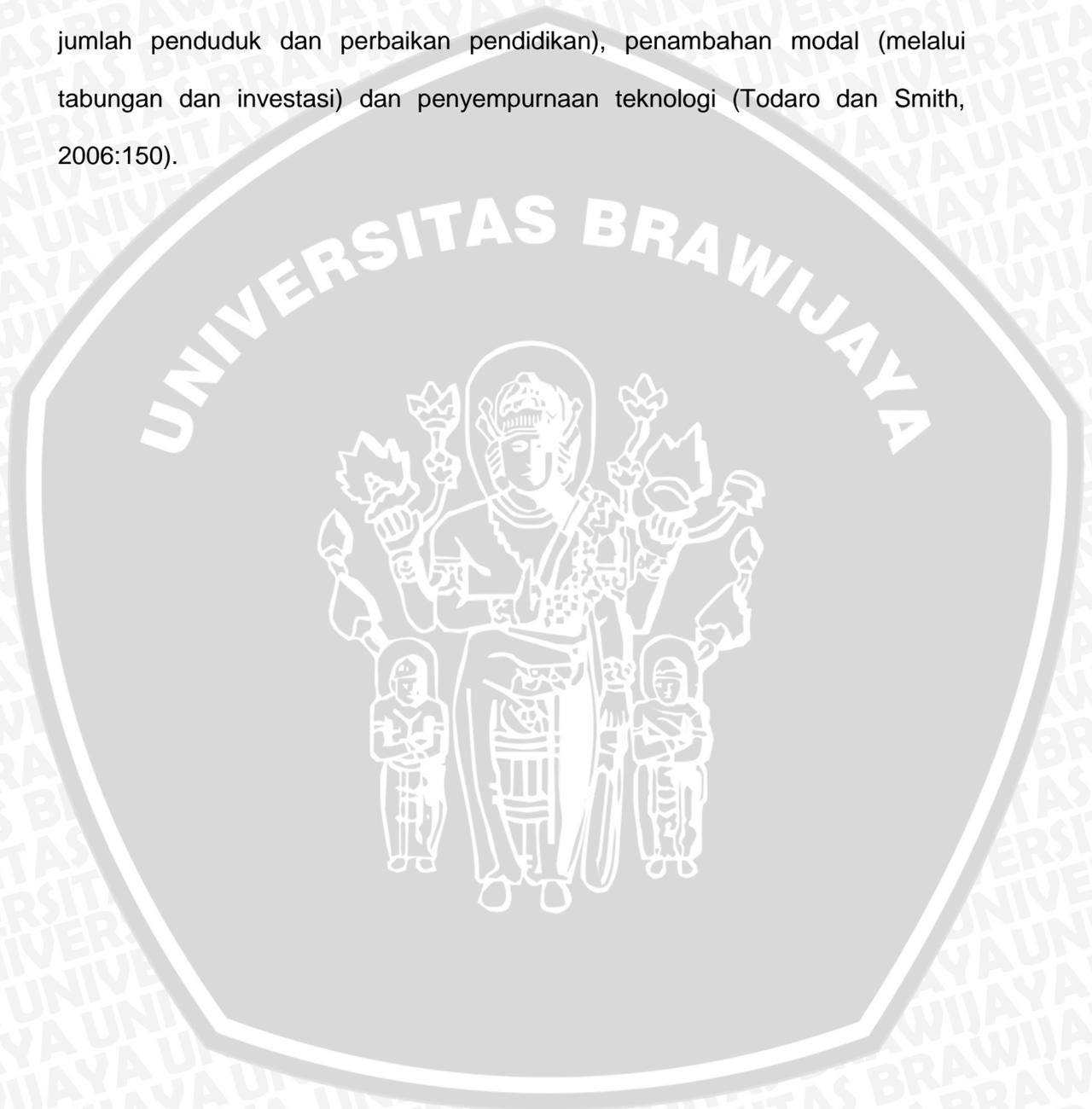
Tabel 4.22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Menurut Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2013 (orang)

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat sd	8.874	252.724	442.585	26.431	340.928	63.435	56.396
3.	SD	37.575	1.032.043	948.188	47.192	691.354	201.056	68.915
4.	SMP	76.621	848.561	830.573	54.199	626.341	328.783	71.985
5.	SMA	241.394	1.559.962	747.746	101.641	967.055	553.017	106.769
6.	S1	63.884	209.560	75.336	19.010	148.836	55.365	16.490

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2013

Tabel di atas dapat memberikan bukti bahwa produktivitas tenaga kerja sektor industri yang tinggi, tidak terlepas dari adanya peran serta kualitas tenaga

kerja yang baik. Kualitas tenaga kerja yang baik tersebut salah satunya adalah tercermin dari tingkat pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan Neoklasik yang menjelaskan bahwa pertumbuhan output selalu bersumber dari tiga hal yaitu, kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan Smith, 2006:150).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh kredit investasi, ekspor non migas, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali tahun 2005-2013. Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil estimasi menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali adalah kredit investasi, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali adalah ekspor non migas.
2. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan searah antara kredit investasi, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja sektor industri terhadap ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali. Sementara itu terdapat hubungan yang berlawanan arah antara ekspor non migas dengan ketimpangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa-Bali.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kebijakan yang tepat untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam pembangunan ekonomi yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan

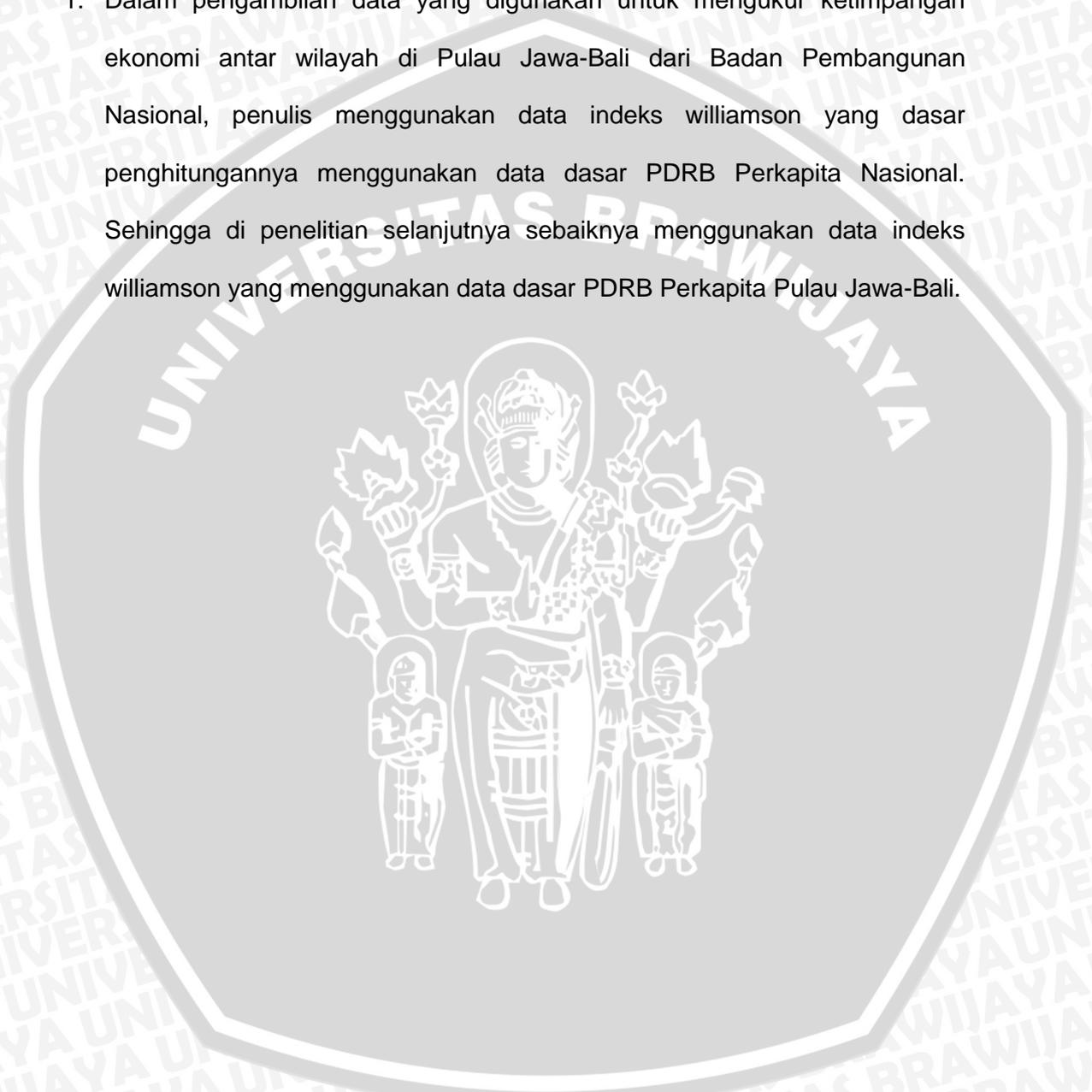
pemerataan pembangunan antar wilayah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan adalah untuk daerah yang termasuk ke dalam daerah tertinggal sebaiknya lebih mengoptimalkan investasi yang disalurkan oleh Bank Umum yang berupa kredit investasi ke sektor yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kemudian, pemerintah perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

2. Dari hasil penelitian, didapatkan sebuah hasil yaitu terdapatnya hubungan negatif antara ekspor non migas dengan ketimpangan ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut, perlu untuk semakin meningkatkan kinerja ekspor melalui perluasan atau diversifikasi negara tujuan ekspor dan meningkatkan kualitas komoditas ekspor. Sehingga apabila ekspor semakin meningkat maka akan membuka peluang kesempatan kerja baru dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat pada khususnya dan pendapatan daerah pada umumnya.
3. Untuk menurunkan ketimpangan antar provinsi tersebut perlu adanya kerja sama antar daerah. Daerah maju dapat memberikan bantuan berupa transfer modal dan fasilitas pendidikan yang nantinya dapat digunakan sebagai modal pembangunan dengan tujuan untuk lebih memajukan daerah yang tergolong maju tetapi tertekan dan daerah yang relatif terbelakang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dalam pengambilan data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa-Bali dari Badan Pembangunan Nasional, penulis menggunakan data indeks williamson yang dasar penghitungannya menggunakan data dasar PDRB Perkapita Nasional. Sehingga di penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data indeks williamson yang menggunakan data dasar PDRB Perkapita Pulau Jawa-Bali.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhamad. 2012. *Teori Ekonomika*. Tangerang: Jelajah Nusa
- Abdullah, Sarini dan Taufik Edy Sutanto. 2015. *Statistika Tanpa Stres*. Jakarta Selatan: TransMedia
- Aliman dan A. Budi Purnomo. 2010. *Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16, No.2
- Arsyad, Lincolin. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIE-YKPN
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIM-YKPN
- _____. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIM-YKPN
- Badan Pusat Statistik. 2009. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indoensia Menurut Lapangan Usaha 2004-2018
- _____. 2013. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indoensia Menurut Lapangan Usaha 2008-2012
- _____. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indoensia Menurut Lapangan Usaha 2010-2014
- Badan Pusat Statistik. 2006. Keadaan Pekerja di Indonesia 2006
- _____. 2007. Keadaan Pekerja di Indonesia 2007
- _____. 2008. Keadaan Pekerja di Indonesia 2008
- _____. 2009. Keadaan Pekerja di Indonesia 2009
- _____. 2010. Keadaan Pekerja di Indonesia 2010
- _____. 2011. Keadaan Pekerja di Indonesia 2011
- _____. 2012. Keadaan Pekerja di Indonesia 2012
- _____. 2013. Keadaan Pekerja di Indonesia 2013
- _____. 2014. Keadaan Pekerja di Indonesia 2014
- Bappenas. 2010. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2010
- _____. 2011. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2011
- _____. 2012. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2012
- _____. 2013. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013
- Bappenas. 2010. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2010
- _____. 2011. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2011
- _____. 2012. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012
- _____. 2013. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013
- _____. 2014. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014
- Barrios, Salvador dan Eric Strobl. 2006. The Dynamic of Regional Inequality.Center for Economic Policy Research. Feb 2016 (available at: www.cepr.org/meets/wken/2/2357/papers/barrios.pdf)
- Deliarnov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

- Daumal, Marrie. 2010. *Impact of Trade Openness on Regional Inequality and Political Unity*. University Paris Dauphine
- Fahmi, Irham. 2008. *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Alumni
- Gujarati, N. Damodar. 2006. *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, N. Damodar and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar – Dasar Ekonometrika: Buku 1*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2012. *Dasar – Dasar Ekonometrika: Buku 2*. Jakarta: Erlangga
- Haryani, Sri. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN
- Hao, Rui dan Zheng Wi. 2007. *Fundamental Causes of Inland Coastal Inequality in Post Reform China*. University of Birmingham
- Herzer, Dierk dan Peter Nunnenkamp. 2013. *Inward and Outward FDI and Income Inequality: Evidence From Europe*. *Review World Economic* (2013) 149:395–422
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamaludin, Rustian. 2007. *Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah Dan Hubungan Ekonomi Keuangan Luar negeri*. Jakarta: Universitas Tri Sakti
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Muradi, Rudy. 2014. *Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Antarprovinsi di Koridor Ekonomi Sulawesi Dalam Era Globalisasi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Putong, Inskandar. 2013. *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2014. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. [PDF]. Pemerintah Republik Indonesia

- Reis, Eustáquio. 2014. Spatial Income Inequality in Brazil 1872 – 2000. *Journal of Economics*. Page : 119–140
- Rubin, Amir dan Simon Fraser. 2015. The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*. (2015), doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.05.007>
- Sagir, Soeharsono. 2009. *Kapita Selektta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Su, Biwei. 2011. Development And Sources Of Labor Productivity In Chinese Provinces. Korea University
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Tambunan, Mangara. 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Turnovsky, Stephen. 2015. Economic Growth and Inequality: The Role of Public Investment. *Journal of Economic Dynamics and Control*, (Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2015.09.009>)
- Webber, Don. 2007. Microeconomic Foundations of Geographical Variations in Labor Productivity. Department of Business Economics, Auckland University of Technology, NZ
- Yinglan, Jin. 2014. International Trade And Income Distribution in China. Department of Economics. University of Birmingham
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis*. Jakarta: PT Grasindo
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing

LAMPIRAN

1. Indeks Williamson menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	2005	0,576	0,62	0,757	0,425	1,245	0,81	0,39
2.	2006	0,58	0,615	0,735	0,416	1,265	0,81	0,38
3.	2007	0,5	0,58	1,04	0,47	1,11	0,57	0,33
4.	2008	0,52	0,61	1,1	0,48	1,1	0,63	0,33
5.	2009	0,53	0,56	1,07	0,48	1,1	0,72	0,35
6.	2010	0,53	0,56	1,05	0,49	1,1	0,65	0,34
7.	2011	0,53	0,6	1,05	0,49	1,11	0,64	0,35
8.	2012	0,63	0,54	0,85	0,49	1,044	0,99	0,33
9.	2013	0,65	0,55	0,83	0,48	1,047	0,98	0,33

Sumber : Bappenas, 2014

2. Kredit Investasi menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013
(Triliun Rupiah)

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	2005	249.575,8	38.081,33	29.594,76	4.022,582	47.150,59	9.590,8	6.711,8
2.	2006	283.037,2	45285,38	34.145,48	4.633,829	52.880,09	12.827	7.576
3.	2007	402.909	42.070	36.645	4.301	70.964	7.918	7.415
4.	2008	537.101	55.539	47.412	5.040	89.657	11.027	9.534
5.	2009	548.380	64.365	53.470	5.369	97.781	11.518	2.533
6.	2010	673.305	79.076	64.053	6.378	113.599	17.362	14.447
7.	2011	752.798,4	120.226,1	84.273,2	10.558,7	13.2424,9	36.312	2.0759
8.	2012	923.468,5	154.710,3	105.888,1	13.131,98	168.907,7	45.336	27.072
9.	2013	161.876,4	193.771,9	127.005,9	16.046,67	219.213	55.274	34.658

Sumber : Bank Indonesia, 2014

3. Ekspor non Migas menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta US\$)

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	2005	23.638,9	213,1	2.039,70	0,9	6.426,80	583,4	236,7
2.	2006	29.034,4	240,7	2899,3	4,4	8740,7	807,3	298,6
3.	2007	31208,9	324	3122,5	2,5	11429,3	577,3	287,7
4.	2008	35,214	412,5	2.287	2,7	8.892	660,3	183,1
5.	2009	31949,6	346,6	2885,3	3,7	10.382	523,3	253,6
6.	2010	39,546	535	3.674	12,9	13805,5	577,5	372,1
7.	2011	46.376	695	4260	13	17.424	806	375
8.	2012	48.073	968	4.513	13	15.524	563	347
9.	2013	47.309	274	4.871	16	15.055	1.123	327

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2014

4. Produktivitas tenaga Kerja Sektor Pertanian menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Jutaa/Pekerja)

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	2005	34,3	28,3	24	49,3	23,8	43,9	89,9
2.	2006	127,02	22,5	21,5	50,7	23,8	23,5	78,9
3.	2007	36,8	23,04	22,04	51,1	24,5	24,5	80,9
4.	2008	51,9	23,7	26,1	53,8	25,9	29,7	82,4
5.	2009	40,7	25,4	25,3	48,4	24,9	27,07	59,4
6.	2010	22,6	26,9	27,9	87,5	28,2	29,1	189,5
7.	2011	20,8	28,02	31,4	108,5	30,1	32,9	136,1
8.	2012	26,5	27,8	33,1	71,6	31,2	30,7	74,5
9.	2013	12,13	31,69	31,29	13,16	34,64	30,82	13,26

Sumber : BPS, data diolah

5. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri menurut Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2005-2013 (Juta/Pekerja)

No.	Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
1.	2005	103,4	72,5	43,5	33,5	112,1	54,4	44,2
2.	2006	112,5	85,7	50,08	29,7	127,96	65,3	43,7
3.	2007	125,02	77,2	50,6	30,7	134,8	62,6	38,6
4.	2008	127,96	69,9	55,1	31,5	135,6	58,1	42,6
5.	2009	161,96	92,5	78,06	35,3	181,5	70,6	64,96
6.	2010	130,4	81,3	61,9	39	138,4	51,9	39,3
7.	2011	130,6	67,9	64,6	26,9	139,4	52,6	38,6
8.	2012	124,4	64,9	57,2	29,2	142,06	50,3	35,07
9.	2013	252,9	12,2	10,7	35,2	223,5	10,7	35

Sumber : BPS, data diolah

